

**DINAMIKA HUBUNGAN KERJA SAMA INDONESIA DAN ARAB
SAUDI TAHUN 2014-2018**

(Skripsi)

Oleh

RITA WIDIYANTI



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2021

ABSTRAK

DINAMIKA HUBUNGAN KERJASAMA INDONESIA DAN ARAB SAUDI TAHUN 2014-2018.

Oleh

Rita Widiyanti

Globalisasi membuat kebutuhan masyarakat Internasional semakin beragam yang mendorong negara-negara senantiasa membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan. Dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri, negara akan membangun kerjasama dengan negara lain. Penelitian ini akan mengkaji dinamika hubungan kerjasama Indonesia dan Arab Saudi tahun 2014-2018. Landasan konseptual yang digunakan adalah liberalisme interdependensi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan teknik data interaktif. Hasil dari penelitian ini dapat dilihat pada hubungan kerjasama Indonesia dan Arab Saudi pada bidang ketenagakerjaan, haji dan umroh serta ekonomi. Pasca ditutupnya pasar tenaga kerja pada bidang ketenagakerjaan berdampak hingga munculnya kebijakan moratorium tahun 2015. Hubungan interdependensi Indonesia dan Arab Saudi dalam bidang Haji dan Umroh berjalan stabil mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi jumlah muslim terbesar didunia dan terbukti Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapatkan jumlah kuota jamaah terbesar dibandingkan negara lain. Interdependensi dalam sektor ekonomi berdasarkan neraca perdagangan kedua negara, Indonesia selalu surplus dalam sektor nonmigas dengan Arab Saudi dan sebaliknya Arab Saudi yang selalu surplus dalam sektor Migas dengan Indonesia.

Kata Kunci : Dinamika Kerjasama, Hubungan Kerjasama, Indonesia dan Arab Saud

ABSTRACT

THE DYNAMICS OF INDONESIA—SAUDI ARABIA'S COOPERATIVE RELATIONSHIP IN THE YEAR OF 2014-2018

By

Rita Widiyanti

Globalization has made the needs of international community more diverse which leads to countries needing one another in order to fulfill these needs. In the venture of fulfilling internal needs of a country, said country will establish cooperation with other countries. This research will examine the dynamics of cooperative relationship between Indonesia and Saudi Arabia in the year of 2014-2018. The conceptual foundation used in this study is Interdependent Liberalism. It uses descriptive qualitative research methods and interactive data techniques.

The result of this study can be seen in the cooperation between Indonesia and Arab Saudi in the fields of labor, Hajj and Umrah as well as economy. The closing of labor market in the field of employment had visible effects on both countries to the point of establishment of moratorium policy in 2015. Interdependence relationship between both countries in the area of Hajj and Umrah runs stably given that Indonesia is country with largest muslim population in the world, proven by Indonesia being one of the country with the biggest pilgrims quota compared to other countries. Interdependence in the economic sector, based on the trade balance of the two countries, is also going well. Indonesia always has surplus in the non-oil and gas sector cooperaton with Saudi Arabia and vice versa, Saudi Arab always has surplus in the oil and gas sector relationship with Indonesia.

Keywords: Cooperative dynamics, Cooperative relationship, Indonesia, Saudi Arabia

**DINAMIKA HUBUNGAN KERJASAMA INDONESIA DAN ARAB SAUDI
TAHUN 2014-2018.**

Oleh

RITA WIDIYANTI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **DINAMIKA HUBUNGAN KERJASAMA
INDONESIA DAN ARAB SAUDI TAHUN 2014-2018**

Nama Mahasiswa : **Rita Widiyanti**

No. Pokok Mahasiswa : **1416071071**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.
NIP 19570728 198703 1 006

Gita Paramita Djausal, S.IP., M.AB.
NIP 19841216 201903 2 004

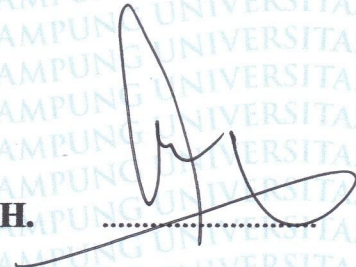
2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP 19600416 198603 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.



Sekretaris : Gita Paramita Djausal, S.IP., M.AB.



Penguji

Bukan Pembimbing: Dr. Suripto, S.Sos., M.AB.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian : 01 Desember 2021

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 30 November 2021

Yang membuat pernyataan



Rita Widiyanti

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis bernama Rita Widiyanti. Penulis dilahirkan di Natar pada tanggal 7 Februari 1997 sebagai anak terakhir dari lima bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Kusman dan Ibu Zulaikhah. Penulis

memulai pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri Bumisari diselesaikan pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan ke MTS Raudlatul Jannah yang diselesaikan pada tahun 2011. Setelah itu dilanjutkan dengan bersekolah di MA Daarul Ma'arif diselesaikan pada tahun 2014.

Penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2014 melalui jalur PMPAP. Penulis aktif dalam HMJ Hubungan Internasional sebagai anggota Departemen Lima HRD. Penulis juga aktif dalam komunitas tari Corpous Motum sejak tahun 2014 dan secara aktif berpartisipasi dalam berbagai acara.

MOTTO

“Suatu kesalahan tetap bisa terjadi, walaupun tidak ada yang salah”
Jiemi Ardian

PERSEMBAHAN



Ku persembahkan mahakarya ini untuk

Kedua orang tuaku tercinta,
Sebagai tanda bukti baktiku
Bapak Kusman dan Ibu Zulaikha

Diriku sebagai bukti perjuangan

Jurusan kebanggaan Hubungan Internasional
Sebagai tempatku menimba ilmu, menorehkan cerita
Berbagi ilmu, dan menjadi bagian dari sejarah hidupku

serta Almamater tercinta
Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji hanya milik Allah SWT, karena hanya dengan izin dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: ” **Dinamika Hubungan Kerja Sama Indonesia dan Arab Saudi Tahun 2014-2018**”, shalawat serta salam tak lupa penulis sanjungkan kepada nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik bagi umatnya.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hubungan Internasional pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh penulis serta tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas segala masukan, saran dan kesabaran yang sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Gita Paramita Djausal, S.Ip, M.AB selaku Dosen Pembimbing Kedua Skripsi yang telah sangat baik dan sabar untuk meluangkan waktu dalam membantu, membimbing, mengarahkan, memberikan kritik dan saran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Suripto, S.Sos, M.A.B, selaku Dosen Pembahas/Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi dan terima kasih telah memberikan kemudahan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Fahmi Tarumanegara.S.IP.M.Si.M.B.A selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu menjadi tempat untuk konsultasi, berbagi cerita. Terima kasih atas motivasi dan semangat untuk menjadi hebat.
7. Seluruh jajaran dosen Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung dan Mba Atta atas dukungan pembelajaran selama menempuh perkuliahan, serta membantu dalam proses administrasi selama perkuliahan.
8. Kedua Orangtuaku, Bapak Kusman dan Ibu Zulaikha atas semua doa, ridho, dukungan, dan materi yang selama ini diberikan. Terimakasih telah bekerja keras untuk menjadikan Rita Widiyanti sebagai anak yang berpendidikan. Semoga bapak dan mamak selalu diberkahi rahmat dan senantiasa diberikan perlindungan serta kesehatan oleh Allah SWT.
9. Kakak-Kakaku tercinta, Mba Rina, Kak Ibob dan Mas Adon sebagai keluarga yang telah memberikan semangat untuk terus menyelesaikan pendidikan S1 ini. Semoga kita selalu bersama, sehat dan menjadi kebanggaan orangtua.

10. Teman-teman yang terus sabar, peduli dan tulus hingga membantu penulis baik materi dan moril kepada penulis, Terima kasih teruntuk Mba Endh dan Mba Tia. Semoga kalian selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan tanpa bantuan kalian berdua saya tidak bisa menyelesaikan skripsi dan pendidikan ini. terimakasih kalian adalah mba dan saudara yang sangat saya sayangi.
11. Teman-teman yang selalu ada Mba Endh, Mba Tia, Hani, Eka, Yuni, Dumora, Ity, Biyes terimakasih selalu ada disaat susah, mendengarkan cerita, memberikan pertolongan dan terima kasih karena kalian waktu yang saya habiskan menjadi sangat berharga dan menyenangkan. Semoga kita selalu terhubung dalam waktu yang panjang.
12. Teman-teman yang selalu saya sayangi, Azka, Onay, Amel, Nisrina, Puspa, terima kasih atas waktu kalian, kenangan yang telah kita lalui bersama, dan pembelajaran dalam hidup yang telah kalian berikan.
13. Teman MA yang selalu ada, Nona terima kasih atas waktu dan motivasi serta selalu menemani kemanapun penulis diakhir-akhir selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan.
14. Afdhalul Fajri yang telah banyak mengorbankan waktu dalam menemani dan mambantu penulis baik materi maupun non materi dan selalu sabar dalam memberikan masukan yang sangat berguna untuk penulis.
15. Untuk seluruh anggota **Corpous Motum**, Dumo, Mba Endh, Hani, Eka, Ity, Yuni, Mba Tia, Azka, Onay, Kak Supran, Kak Deya, Rima, Kak Sisil,

Kak Meka terima kasih untuk waktu-waktu yang menyenangkan selama latihan.

16. Seluruh teman-teman Jurusan Hubungan Internasional angkatan 2014, semoga kita semua bisa menggapai mimpi kita masing-masing dengan jalan masing-masing kedepan.
17. Semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam bentuk apapun.

Bandar Lampung, 30 November 2021

Penulis,

Rita Widiyanti

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR SINGKATAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Kegunaan Penelitian	14

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu	16
2.2 Landasan Konseptual	22
2.2.1 Teori Neoliberalisme	22
2.2.2 Liberalisme Interdependensi	26
2.3 Kerangka Pemikiran	28

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian	31
3.2 Fokus Penelitian	32
3.3 Jenis dan Sumber Data	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data	33
3.5 Teknik Analisis Data	34

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Kerjasama Indonesia dan Arab Saudi	36
4.2 Sektor Kerjasama Indonesia dan Arab Saudi	43
4.2.1 Pengiriman Haji dan Umroh	43
4.2.2 Kerjasama Ekonomi	47

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Kerjasama Indonesia dan Arab Saudi dalam Pandangan- Liberalisme Interdependensi	51
5.2 Dinamika Kerjasama Indonesia dan Arab Saudi	54
5.2.1 Ekspor Indonesia Arab Saudi	54
5.2.2 Impor Indonesia Arab Saudi	61
5.2.3 Total Perdagangan dan Neraca perdagangan- Indonesia ke Arab Saudi Tahun 2014-2018	64
5.2.4 Kerjasama Haji dan Umroh	68

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan	80
6.2 Saran	83

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Total Ekspor Indonesia-Arab Saudi Tahun 2014-2018.....	58
Gambar 5.2 Total Impor Indonesia-Arab Saudi Tahun 2014-2018.....	62
Gambar 5.3 Jumlah Jamaah Haji Indonesia ke Arab Saudi Tahun 2014-2018.....	73
Gambar 5.4 Runtuhnya Crane di Kakbah Arab Saudi.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2011-2014.....	4
Tabel 1.2 Total Perdagangan Indonesia-Arab Saudi 2011-2014.....	11
Tabel 1.3 Total Ekspor Indonesia-Arab Saudi 2011-2014.....	12
Tabel 1.4 Total Impor Indonesia-Arab Saudi 2011-2014.....	13
Tabel 4.1 Nota Kesepahaman Indonesia dan Arab Saudi.....	42
Tabel 5.1 Lima Komoditas Ekspor Tertinggi Indonesia-Arab Saudi.....	59
Tabel 5.2 Lima Komoditas Impor Tertinggi Indonesia-Arab Saudi	63
Tabel 5.3 Total Perdagangan Indonesia-Arab Saudi Tahun 2014-2018.....	66
Tabel 5.4 Neraca Perdagangan Indonesia-Arab Saudi Tahun 2014-2018.....	66
Tabel 5.5 Korban jatuhnya Crane dari Berbagai Negara.....	75

DAFTAR SINGKATAN

APO	: <i>Asian Productivity Organization</i>
BPS	: Biro Pusat Statistik
BNP2TKI	: Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
GCC	: <i>Gulf Cooperation Council</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HDI	: <i>Human Development Indeks</i>
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
JWC	: <i>Joint Working Commite</i>
KBRI	: Kedutaan Besar Republik Indonesia
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MoU	: <i>Memorandum Of Understanding</i>
OPEC	: <i>Organization Of Petroleum Exporting Countries</i>
PPTKLN	: Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negri
PRT	: Pekerja Rumah Tangga
RDPU	: Rapat Dengar Pendapat Umum
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah

SBY	: Susilo Bambang Yudhoyono
SD	: Sekolah Dasar
SDM	: Sumber Daya Manusia
SDA	: Sumber Daya Alam
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>
WNI	: Warga Negara Indonesia
KJRI	: Konsulat Jenderal Republik Indonesia
UKM	: Usaha Kecil Menengah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
JVDA	: Joint Venture Development Agreement
FDI	: Foreign Direct Investment
PEN	: Pengembangan Ekspor Nasional
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BPKH	: Badan Pengelola Dana Haji

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan kerjasama merupakan bentuk interaksi antar negara untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kepentingan. Globalisasi membuat kebutuhan masyarakat Internasional semakin beragam sehingga mendorong negara-negara senantiasa membutuhkan negara lain untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Hal ini disebabkan oleh potensi yang dimiliki tiap-tiap negara berbeda seperti perbedaan kondisi geografi, tingkat penguasaan IPTEK atau perbedaan iklim dan perbedaan kualitas dan kuantitas produksi setiap negara juga berbeda-beda.

Menurut Koesnadi Kartasasmita kerjasama Internasional harus dilakukan suatu negara karena adanya hubungan interdependensi dan semakin kompleks kehidupan manusia dalam masyarakat Internasional.¹ Situasi global saat ini sulit bagi negara untuk mencapai kepentingan jika tidak membangun kerjasama dengan negara lain. Oleh karena itu negara harus memperjuangkan kepentingannya. Selain memenuhi kepentingan, negara perlu membangun kerjasama sebagai bentuk eksistensi keberadaan suatu negara dalam dunia internasional.

¹Kartasasmita Koesnadi. 1997. Administrasi Internasional. Bandung: Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung. hlm 19

Dalam rangka mencapai kepentingan negara harus menghargai kepentingan negara lain karena hal ini merupakan salah satu syarat hubungan kerjasama dapat terwujud dengan damai. Negara juga harus dapat mengambil keputusan bersama secara bijak apabila terjadi persoalan yang akan merugikan salah satu negara. Hal ini juga sangat penting untuk menghindari persoalan-persoalan jangka panjang yang dapat merusak hubungan kerjasama. Dalam mencapai keputusan bersama diperlukan komunikasi dan konsultasi secara berkesinambungan. Komunikasi dan konsultasi harus lebih intens daripada sebuah komitmen². Hubungan komunikasi intens terkait kerjasama misalnya hubungan kerjasama yang sejak dulu telah terbangun antara Indonesia dan Arab Saudi yang ditandai melalui kerjasama pengiriman jamaah haji dan pengiriman tenaga kerja.

Kerjasama Indonesia dan Arab Saudi telah terwujud sejak tahun 1947 sejak pembukaan kantor perwakilan Indonesia pertama di Timur Tengah yaitu di Mesir, Kairo³. Selain itu dibukanya kantor Kedutaan Besar (KEDUBES) di Jakarta dan KBRI didirikan di Jeddah pada tahun 1955. Kerjasama ini mulanya hanya secara informal namun seiring proses hubungan kedua negara semakin dekat maka ditingkatkan menjadi hubungan diplomatik. Hubungan kerjasama Indonesia dan Arab Saudi meliputi berbagai bidang misalnya Ekonomi, Politik, Ketenagakerjaan, dan Pendidikan. Sektor Ekonomi meski sudah terjalin namun belum maksimal berbeda dengan sektor ketenagakerjaan yang cukup menggambarkan hubungan kerjasama intens antara Indonesia dan Arab Saudi.

²Holsti, K J. 1992. *International Politics, A Framework for Analysis*. New Jersey Prentice Hall. hlm 10.

³Putuhena Shaleh. 2007. *Histografi Haji Indonesia*. Yogyakarta. Hal 28

Sektor Ketenagakerjaan merupakan sektor paling menonjol dalam sejarah hubungan kerjasama Indonesia dan Arab Saudi. Pada tahun 1970 Pemerintah Indonesia mengadakan program penempatan TKI ke Luar Negeri dengan tujuan memenuhi permintaan tenaga kerja dari luar negeri dan memenuhi tingginya permintaan TKI yang ingin berkerja diluar negeri. Kemudian pada tahun 1975 Pemerintah Indonesia mulai melakukan pengiriman TKI ke Arab Saudi. Pada awal tahun pengiriman TKI hanya berjumlah 25 orang kemudian naik pada tahun 1976 sebanyak 480 orang dan terus meningkat tajam pada tahun 1977 sebanyak 2.838 dan terus mengalami peningkatan hingga saat ini. Tingginya angka minat TKI yang ingin berkerja di Arab Saudi antara lain dipengaruhi oleh tingginya angka pengangguran, kemiskinan dan sempitnya lapangan pekerjaan yang tersedia sedangkan jumlah angkatan kerja Indonesia terus meningkat.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah populasi penduduk paling padat di dunia namun tidak didukung dengan jumlah lapangan pekerjaan yang memadai. Hal ini kemudian mendorong tenaga kerja Indonesia harus mencari pekerjaan di Arab Saudi mengingat upah yang didapatkan juga lebih besar dibandingkan di Indonesia. Pengiriman tenaga kerja Indonesia sampai saat ini didominasi tenaga kerja yang ditempatkan pada sektor informal bukan pada sektor formal. Menurut Bremen sektor informal adalah suatu pekerjaan yang kurang mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah serta tidak terorganisir dengan baik.⁴ Sektor informal menunjukkan bahwa para pekerja tidak dibekali kemampuan dan keterampilan yang memadai serta tidak memerlukan pendidikan.

⁴ Bremen, JC. 2000. *The Informal Sector In Research, Theory and Practice*, Rotterdam

Para pekerja sektor informal meliputi buruh, petani, peternak, maupun pedagang kaki lima. Dominasi pengiriman tenaga kerja sektor informal diperburuk bahwa kompetensi, kemampuan dan keterampilan tenaga kerja Indonesia lebih rendah dibandingkan negara lain. Berdasarkan laporan UNDP tahun 2015, dilihat dari *Human Development Indeks (HDI)* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indonesia berada pada peringkat ke 113 dari 188 negara.⁵

Produktivitas Tenaga kerja dalam suatu negara memiliki peranan yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Lodofitus Dando, berdasarkan hasil penelitian PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) menyebutkan bahwa kemajuan sebuah bangsa 90 persen ditentukan oleh SDM dan 10 persen oleh SDA.⁶ Rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia dan didukung kurangnya jumlah lapangan pekerjaan membuat jumlah pengiriman tenaga kerja Indonesia meningkat setiap tahunnya. Ada beberapa negara tujuan yang paling diminati buruh migran Indonesia seperti Arab Saudi, Malaysia, dan Taiwan.

Tabel 1.1 Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Periode 2011-2014

No	Negara	2011	2012	2013	2014
1	Arab Saudi	137.835	40.905	45.399	44.322
2	Malaysia	134.120	134.023	150.236	127.827

⁵ Ranking Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Turun ke-113. Maret 2017. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170322182446-78-202081/ranking-indeks-pembangunan-manusia-indonesia-turun-ke-113>

⁶ Rinaldi. Strategi Peningkatan Kualitas dan Profesionalitas Tenaga Kerja dalam Menyongsong MEA 2015. Hal 15

3	Taiwan	78.865	81.071	83.544	82.665
---	--------	--------	--------	--------	--------

Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi (PUSLITFO) BNP2TKI dan Badan Pusat Statistik.

Dalam Tabel diatas terlihat bahwa pengiriman TKI terbesar ke Malaysia kemudian Taiwan dan Terakhir Arab Saudi. Namun tiga negara ini adalah negara tujuan pengiriman TKI terbesar bagi Indonesia. Meski Arab Saudi negara dengan pengirim terbesar ketiga faktanya jumlah kekerasan dan pengaduan terbesar berasal dari Arab Saudi. Arab Saudi adalah negara dengan laporan terbanyak terkait bentuk permasalahan tenaga kerja Indonesia. Hal ini kemudian mendorong banyaknya kasus *trafficking in person for labor* di Arab Saudi. *Trafficking in Person for labor* adalah fenomena perdagangan manusia untuk tenaga kerja.

Arab Saudi terus menjadi negara pilihan Indonesia dan terus menunjukkan peningkatan jumlah pengiriman tenaga kerja tiap tahunnya. Akibatnya sampai saat ini Arab Saudi adalah negara dengan penghasil sumber remitansi terbesar bagi Indonesia yaitu 236,736,367 milliar dollar AS dengan jumlah pekerja migran terbanyak hingga 966 pada tahun 2017 hingga bulan februari⁷. Sedangkan berdasarkan laporan World Bank yang dikeluarkan pada tahun 2017 Indonesia memuncaki sepuluh besar penerima remitansi tertinggi di dunia hingga 9,2 milliar dollar AS.⁸

Remitansi adalah transfer uang yang dilakukan oleh pekerja asing kepada penerima dinegara asal. Remitansi merupakan salah satu arus uang terbesar yang

⁷*Ibid*

⁸ Migration and compact on migration. April 2017 hlm 3. Diakses melalui <https://refugeesmigrants.un.org/migration-compact>

dihasilkan pekerja migran dinegara berkembang. Bank Indonesia menyatakan bahwa remitansi menyumbang 10% dari APBN dan menempati posisi kedua setelah pendapatan sektor migas.⁹ Kenyataan ini harusnya memberikan keuntungan dan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Tingginya angka remitansi TKI ternyata tidak selaras dengan jaminan perlindungan keselamatan tenaga kerja. Berdasarkan laporan Kementrian Luar Negri sebanyak 15.748 kasus telah terjadi oleh Warga Negara Indonesia (WNI); 86 persen dari keseluruhan kasus berasal dari permasalahan Tenaga Kerja Indonesia. Masalah itu didominasi oleh kasus TKI domestik seperti pembantu rumah tangga, tukang kebun, dan supir hingga mencapai 55 persen atau setara dengan 8.669 kasus¹⁰.

Tercatat Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki paling banyak kasus termasuk terkait keimigrasian hingga mencapai 10.414 kasus yang berkaitan dengan kepemilikan dokumen yang tidak lengkap misalnya penyalahgunaan izin tinggal/visa, telah melebihi masa tinggal, kekerasan fisik,kekerasan seksual, tidak mendapatkan cuti maupun libur, tidak diberikan akses kesehatan, bahkan yang lebih buruk sebanyak 1.111 kasus pidana. Arab Saudi adalah negara yang memiliki kasus tenaga kerja Indonesia terbanyak dan yang paling menyita perhatian masyarakat Indonesia adalah pada 12 Februari 2008 yaitu Yanti Iriyanti dan pada 18 Juni 2011 Ruyati. Tercatat pada tahun 2013 terdapat 42 kasus

⁹ Ini dia mengapa TKI disebut Pahlawan Devisa Negara. Diakses melalui <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2038367/ini-dia-mengapa-tki-disebut-pahlawan-devisa-negara>

¹⁰ Kementrian Luar Negri. 2017. *kaleidoskop perlindungan WNI 2016 tahun kedua kabinet kerja*, , hlm 11

hukuman mati TKI di Arab Saudi dan 9 kasus sudah divonis sedangkan 33 kasus lainnya masih dalam proses¹¹.

Tingginya angka kekerasan Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi berkaitan dengan sistem *Kafala* yang berlaku di negara tersebut. Sistem *Kafala* adalah “*sponsorship system that regulates residency and employment of the workers in the Gulf Cooperation Council (GCC) countries*”¹²(sistem sponsor yang mengatur tempat tinggal dan pekerjaan pekerja di negara-negara dewan kerja sama di negara-negara GGC. atau “*a system used to monitor the construction and domestic migrant laborers in the Arab States of the Persian Gulf*”¹³(sistem yang digunakan untuk mengawasi konstruksi dan buruh migran domestik di negara-negara Arab dan Teluk Persia).

Sedangkan sistem *Kafala* yang berlaku adalah “*an employer assumes responsibility for a hired migrant worker and must grant explicit permission before the worker can enter Saudi Arabia, transfer employment, or leave the country. The Kafala system gives the employer immense control over the worker*”¹⁴ (majikan mengambil tanggung jawab untuk pekerja migran yang disewa dan harus memberikan izin eksplisit sebelum pekerja dapat memasuki Arab Saudi, mengalihkan pekerjaan, atau meninggalkan negara. Sistem *Kafala* memberikan majikan kontrol yang sangat besar terhadap pekerja). Dengan adanya

¹¹*Migrant Care* : 256 TKI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri diakses melalui <https://www.liputan6.com/global/read/786508/migrant-care-256-tki-terancam-hukuman-mati-di-luar-negeri> diakses pada 29 September 2018.

¹² Human Right Watch. 2008. All if I Am Not Human. Abuses Against Asian Domestic Workers in Saudia Arabia.

¹³*Ibid*

¹⁴ *Ibid*

sistem tersebut membuat para tenaga kerja Indonesia sangat terikat dengan regulasi yang ditetapkan oleh majikannya. Sistem tersebut juga yang melegalkan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia bagi TKI di Arab Saudi.

Tingginya angka kekerasan yang dialami oleh TKI kemudian mendorong Pemerintah Indonesia melakukan soft moratorium. Soft moratorium adalah tindakan Pemerintah Indonesia dengan memberikan peringatan kepada Pemerintah Arab Saudi karena tingginya angka kekerasan TKI. Pada tahun 2011 dibawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Indonesia telah melakukan kebijakan berupa moratorium. Peringatan yang dikeluarkan Indonesia terhadap Arab Saudi dalam bentuk soft moratorium pada Januari 2011 telah sepakat untuk melakukan pembenahan baik bagi Indonesia maupun Arab Saudi. Indonesia meliputi Recruitmen Calon TKI, Pemberian pelatihan yang jelas, Uji kesehatan, Jaminan asuransi keselamatan pekerja, dan Pembekalan. Sedangkan Arab Saudi terkait Regulasi dan Sosialisasi.

Pembenahan meliputi proses pengiriman TKI yang lebih baik misalnya pemberian pelatihan yang jelas, uji kesehatan, pembekalan, rekrutmen calon TKI, maupun jaminan asuransi keselamatan pekerja. Sedangkan pembenahan yang dilakukan oleh Arab Saudi terkait regulasi dan sosialisasi. Hal ini berkaitan dengan permintaan tenaga kerja yang dilihat melalui penambahan syarat-syarat agar majikan mempekerjakan TKI terseleksi dengan lebih baik.

Kebijakan soft moratorium ini kemudian di tanggapi oleh Pemerintah Arab Saudi dengan memberhentikan proses rekrutmen dan pemberian visa kepada

TKI. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sempat mengalami ketegangan yang ditandai oleh pernyataan Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Mustafa bin Ibrahim Al Mubarak pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa penyiksaan terhadap pekerja migran hanya masalah kecil yang dibesar-besarkan oleh media. Kemudian Presiden SBY pada masa itu menyatakan bahwa pernyataan Dubes Arab merupakan pemicu ketegangan antara Indonesia dan Arab Saudi.

Namun ketegangan ini tidak berlangsung lama karena pengiriman tenaga kerja Indonesia resmi dibuka kembali pada 19 Februari 2014 di Riyadh yang ditandai dengan penandatanganan MOU antara Indonesia dan Arab Saudi. Kemudian dibentuk "*Agreement between the Government of The Republic of Indonesia and The Government The Kingdom of Saudia Arabia on the placement & protection of Indonesian domestic workers*". Dilanjuti pada 5 September 2014 melalui *Joint Working Commite (JWC)*. Kesepakatan ini menghasilkan beberapa perjanjian diantaranya penyelesaian hubungan kerja, penyediaan sarana komunikasi dan hari libur serta sistem penggajian TKI melalui perbankan, dan penghasilan TKI senilai 10.000 riyal.

Pasca kebijakan soft moratorium diberlakukan angka penurunan pengiriman tenaga kerja cukup membuahkan hasil. Namun hal ini tidak berlangsung lama Meskipun pemerintah telah melakukan soft moratorium namun tetap saja pengiriman tenaga kerja Indonesia tetap berjalan. Proses pengiriman tenaga kerja ini dilakukan oleh oknum-oknum ilegal yang tidak bertanggung jawab yang kemudian memicu munculnya permasalahan baru. Seperti penyelundupan manusia, perdagangan manusia antar negara dan meningkatnya

kasus-kasus pelarangan pulang TKI yang telah habis masa kontrak oleh majikannya.

Kemudian moratorium dilakukan kembali pada tahun 2015 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan menerbitkan kebijakan penghentian pengiriman buruh migran ke Timur Tengah termasuk Arab Saudi melalui Kepmen No 260/2015 mengenai penghentian dan pelarangan pengiriman tenaga kerja Indonesia untuk berkerja pada penggunaan perseorangan ke Timur Tengah. Penghentian secara permanen ini meliputi penempatan tenaga kerja Indonesia sektor rumah tangga ke 21 negara Timur tengah termasuk Saudi Arabia. Namun kebijakan ini hanya terkait penempatan baru sedangkan TKI yang sudah bekerja disana tidak akan dipulangkan. Semi moratorium yang telah dilakukan Indonesia pada tahun 2011 kemudian dipermanenkan melaui surat keputusan menteri tenaga kerja yang ditandatangani pada 4 Mei 2015¹⁵.

Setelah pemberlakuan moratorium permanen pada Mei 2015 dan Indonesia telah menutup pasar tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi ternyata hubungan kerjasama Indonesia dan Arab Saudi dalam sektor ekonomi yang mulanya tidak menonjol kemudian menjadi cukup intens. Hal ini didukung oleh kunjungan Presiden Joko Widodo pada 2015 ke Arab Saudi dalam rangka pemberian penghargaan kehormatan tertinggi bagi kepala negara sahabat. Penghargaan ini adalah medali King Abdul Aziz yang diberikan oleh istana Al Salam Jeddah. Selain itu adanya kunjungan Raja Salman untuk pertama kalinya pada tahun 2017

¹⁵ Diakses melalui

<https://nasional.kompas.com/read/2015/05/05/09434371/Ini.pelarangan.tki.ke.timut.tengah>
Pada 16 September 2018.

sejak 47 tahun terakhir yaitu pada tahun 1970 sejak kunjungan Raja Faisal bin Abdulaziz Al Saud kepada presiden Soeharto pada saat itu.¹⁶

Kedatangan Raja Salman ini memberikan sinyal positif bagi hubungan ekonomi Indonesia dan Arab Saudi yang relatif jarang dilakukan padahal sudah sejak dulu terjalin. Terkait kedatangan Raja Salman keuntungan politik cukup signifikan karena meningkatkan kredibilitas islam dan menopang reputasi publik domestik nya terutama bagi muslim Indonesia. Indonesia adalah salah satu mitra penting dan potensial bagi Arab Saudi.¹⁷ Dalam sektor ekonomi dan perdagangan dimulai sejak diselenggarakan *middle east update* di Medan pada 23-24 maret tahun 2010, Bandung 29-30 Maret 2010, Pontianak Juni 2010 dan Palembang 11-12 Oktober 2010. Selain itu juga menghadirkan pengusaha Arab Saudi INACRAFT pada April 2010.

Tabel 1.2 Total Perdagangan Indonesia-Arab Saudi

Tahun	Total Perdagangan
2010	5.528.136,3
2011	6.856.719,0
2012	6.973.852,1

¹⁶ Menelusuri Kegiatan Raja Arab Saudi di Indonesia. Maret 2017 diakses /06060051/menelusuri.kegiatan.raja.arab.saudi.di.indonesia.47.tahun.silam

¹⁷ Muhammad Zulfikar Rakhmat. 2016. *A Potential Partner for Gulf States*.

2013	8.260.441,1
2014	8.672.549,1

Sumber : BPS

Berdasarkan tabel diatas neraca perdagangan Indonesia dan Arab Saudi menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Terbukti sejak tahun 2010 berada pada angka 5.528.136,3 dan mengalami kenaikan di tahun berikutnya yaitu 6.56.719 pada tahun 2011, pada tahun 2012 yaitu sebesar 6.973.852,1 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2013 sebesar 8.260.441,1 dan pada tahun 2014 sebesar 8.672.549,1.

Tabel 1.3 Total Ekspor Indonesia-Arab Saudi

Tahun	Total Ekspor
2010	1.167.296,6
2011	1.430.125,7
2012	1.774.457,6
2013	1.734.016,7
2014	2.156.325,1

Sumber : BPS

Berdasarkan tabel diatas total ekspor Indonesia ke Arab Saudi menunjukkan angka yang baik dimana terus mengalami kenaikan ekspor. Terbukti sejak tahun 2010 total ekspor berada pada angka 1.167.296,6 ditahun berikutnya yaitu sebesar 1.430.125,7 pada tahun 2011. Meningkat lagi pada tahun 2012 yaitu 1.774.457,6 dan mengalami penurunan sedikit pada tahun 2013 yaitu 1.734.016,7 dan kembali

naik pada tahun 2014 yaitu sebesar 2.156.325,1. Komoditas utama ekspor Indonesia adalah : Kendaraan, otomotif suku cadang, minyak kelapa, ban, tekstil, elektronika, kayu, produk kayu, ikan tuna, produk listrik.

Tabel 1.4 Total Impor Indonesia-Arab Saudi

Tahun	Total Impor
2010	4.360.839,7
2011	5.426.593,3
2012	5.199.395,1
2013	6.526.424,5
2014	6.516.224,0

Sumber : BPS

Berdasarkan tabel diatas total impor Indonesia ke Arab Saudi mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana pada tahun 2010 impor Indonesia berada pada angka 4.360.839,7, pada tahun 2011 juga meningkat sebesar 5.426.593,3 dan mengalami penurunan sedikit pada tahun 2012 yaitu 5.199.395,1 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar 6.526.424,5 dan 6.516.224,0 pada tahun 2014.

Berdasarkan laporan diatas neraca perdagangan Indonesia-Arab Saudi Tahun 2010-2014 berhasil surplus dalam sektor non migas namun selalu defisit pada sektor migas. Meski begitu sektor ketenagakerjaan merupakan sektor yang paling menonjol dalam hubungan kerjasama Indonesia dan Arab Saudi. Kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi merupakan kerjasama bilateral yang dilakukan oleh dua negara. Jika dilihat dari bentuknya kerjasama ini masuk dalam kategori *Bargaining Cooperation*. *Bargaining Cooperation* adalah kerjasama

yang didasarkan pada perjanjian pertukaran barang dan jasa antar individu ataupun kelompok. Tujuannya adalah untuk mencapai keuntungan antar keduanya, Arab Saudi dapat mengisi lapangan pekerjaan domestik yang kosong seperti pekerja rumah tangga dan Indonesia dapat membantu perekonomian karena angka remitansi yang tinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka penulis menemukan rumusan masalah yang akan diteliti :

Bagaimana dinamika hubungan kerjasama Indonesia dan Arab Saudi Tahun 2014-2018 pasca moratorium?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dinamika hubungan kerjasama yang terjalin antara Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Serta mengetahui hubungan kerjasama setelah dibelakukannya moratorium.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Turut mengembangkan teori hubungan internasional terutama dalam kajian ekonomi global.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menjadi bahan masukan dalam mengembangkan kajian ekonomi global dan dapat

bermanfaat bagi bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

- c. Diharapkan dapat membantu dan berkontribusi dalam rangka memperluas wawasan mengenai dinamika kerjasama yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.
- d. Untuk mengetahui prospek kerjasama Indonesia dan Arab Saudi pasca moratorium tahun 2015.

2. Segi Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam mengembangkan kajian ekonomi politik internasional
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan informasi bagi pemerintah, sipil dan organisasi-organisasi non-pemerintah untuk dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menjelaskan mengenai kerjasama Indonesia dan Arab Saudi dan langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam meminimalisir kasus kekerasan TKI di Arab Saudi. Didalam implementasinya terdapat beberapa strategi dan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menjalin kerjasama dan menentukan langkah-langkah Pemerintah Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan empat literatur dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang sama.

Pertama, penelitian yang berjudul *Kebijakan Perlindungan Buruh Migran Perempuan Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010 (Studi Terhadap Perlindungan Buruh Migran Perempuan Indonesia di Malaysia)*. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai peningkatan angka kekerasan TKI Indonesia pada tahun 2004-2010 telah menjadi perhatian masyarakat internasional. Dalam tulisan ini juga menyatakan bahwa dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jaminan keselamatan dan perlindungan bagi buruh migran belum dapat dikatakan memenuhi kebutuhan migran Indonesia.

Jumlah korban kekerasan dan penganiayaan buruh migran perempuan yang ada di Malaysia ternyata tertinggi kedua setelah tingginya angka korban kekerasan di Saudi Arabia. Kebijakan perlindungan yang dibuat pada Pemerintahan Megawati namun diimplementasikan pada Pemerintahan SBY diantaranya adalah UU No 39 tahun 2004 mengenai penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri (PPTKLN). Kualitas kebijakan perlindungan yang berpihak pada perlindungan buruh migran perempuan dapat dilihat dari partisipasi politik buruh migran perempuan dan kelompok migran pada tahap penyusunan kebijakan sebagai bagian dari nilai demokrasi. Namun nyatanya penyusunan kebijakan tidak dilakukan dengan baik karena pemerintah hanya melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Serikat Asosiasi Buruh dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU).

Situasi tersebut membuat TKI masih mengalami kekerasan dan penganiayaan, penipuan, pemerasan selama masa pra penempatan, penempatan dan purna penempatan. Meskipun gerakan perempuan dan agensi kebijakan perempuan dapat diwakilkan oleh LSM dan kelompok buruh migran namun hal tersebut tidak dapat mengawasi penyusunan kebijakan perlindungan hingga tahap implementasi kebijakan. Ketidakterlibatan buruh migran perempuan dalam penyusunan kebijakan perlindungan membuat masa Pemerintahan SBY merupakan dampak bersatunya konsep kapitalisme dan patriarki.

Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono memperlihatkan bahwa peningkatan pemahaman buruh migran perempuan yang seharusnya berhak mendapatkan haknya termasuk hak berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan perlindungan. Oleh karena itu

angka kekerasan terhadap buruh migran Indonesia yang didominasi oleh perempuan di sekitar informal semakin meningkat setiap tahunnya.

Kedua, Upaya BNP2TKI dalam Mencegah Terjadinya Trafficking in Person Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi oleh Sastya Anggun Khairunnisa. Penelitian ini menjelaskan tingginya populasi penduduk di Indonesia tidak didukung oleh lapangan pekerjaan yang memadai yang memicu terus meningkatnya angka pengangguran. Selain itu kemiskinan dan ketidaksejahteraan penduduk terus semakin meningkat. Hal inilah kemudian yang mendorong tenaga kerja Indonesia bermigrasi dan mencari pekerjaan di luar negeri. Hal ini didukung oleh pendapatan gaji yang lebih besar jika dibandingkan di Indonesia.

Arab Saudi termasuk negara anggota reservasi terhadap piagam perjanjian yang telah ditandatanganinya. Kasus konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW). Reservasi tersebut adalah :

1. Jika ada perbedaan kondisi antara isi CEDAW dengan hukum di Saudi Arabia, Saudi Arabia tidak wajib untuk mengikuti aturan CEDAW
2. Saudi Arabia tidak wajib mematuhi aturan dari pasal 9 (2) dan pasal 29 (1). Pada tahun 2011 Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan tindakan tegas dengan memutuskan moratorium pengiriman tenaga kerja sektor informal ke Saudi Arabia.

Dalam upaya yang telah dilakukan oleh BNP2TKI dalam rangka mencegah dan meminimalisir kasus *trafficking in person for labor*, tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantaranya adalah kerjasama yang dilakukan oleh BNP2TKI dengan instansi

dalam negeri akan mengurangi penempatan ilegal dan perpindahan TKI dengan jalur tidak resmi. Berlakunya sistem online akan meminimalisir kecurangan dan pemalsuan. Sedangkan kelemahannya adalah BNP2TKI diberikan kewajiban untuk menyelesaikan masalah, namun hukum yang ada tidak menjelaskan yang sebenarnya dan dampaknya terjadi tumpang tindih wewenang dan fungsi yang dijalankan. Selain itu SDM dari BNP2TKI jumlahnya terbatas selain itu dari kemampuan, kualitas dan sarana prasarana belum memadai. Hal inilah yang kemudian koordinasi antara pihak-pihak tersebut harus diperkuat agar tujuan meminimalisir kekerasan TKI di Arab Saudi bisa tercapai.

Ketiga, Kebijakan Negara Terhadap PRT Migran di Indonesia: Telaah Gender dan Hubungan Internasional oleh Ani Soetjito. Kajian mengenai pekerja rumah tangga (PRT) sudah banyak dibahas dimasyarakat Internasional. Tingginya angka migrasi tenaga kerja perempuan bagi dunia ketiga atau biasa disebut negara miskin dianggap hal yang lumrah terjadi dan belum mendapatkan penanganan yang serius. Pada tahun 2009 berdasarkan laporan ILO jumlah PRT didunia mencapai 52,6 juta dan dari kaum perempuan sebanyak 43,7 juta atau sebesar 73%. Berdasarkan data yang dihimpun di Asia, Indonesia pengirim tenaga kerja terbanyak ketiga setelah Filipina dan Sri Lanka.

Negara-negara tujuan pengiriman buruh migran adalah ke Saudi Arabia hingga mencapai 257.217, Malaysia 222.198, dan Singapura 37.496. berdasarkan jumlah keseluruhan buruh migran Indonesia mencapai 90 persen adalah buruh migran perempuan. Selain itu karena banyaknya jumlah pengiriman buruh migran Indonesia mendapatkan remitansi yang cukup besar dan berasal dari Saudi Arabia dan Malaysia. Pada tahun 2013 remitansi yang berasal dari Saudi Arabia

mencapai US 1720 juta dollar dan Malaysia hingga US 2,560 juta dollar. Artinya para pekerja buruh migran berkontribusi pembangunan melalui effect tricle down 1,6% dari GDP Negara. Namun disisi lain pemerintah belum dapat memberikan perlindungan yang diharapkan oleh buruh migran.

Pengiriman tenaga kerja dianggap sebagai ketidakmampuan negara dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja termasuk sempitnya lapangan pekerjaan. Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla secara tegas menyebutkan butir-butir perlindungan keselamatan tenaga kerja dalam visi misi Nawacita yaitu “negara akan hadir untuk melindungi segenap warga negara Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri. Selanjutnya visi misi nawacita dikolaborasi dengan RPJMN 2015 (Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015). Permasalahan mengenai dilematika buruh migran secara eksplisit disebutkan dalam sasaran kebijakan serta target pendanaan. Secara umum komitmen Pemerintah Indonesia dalam melindungi PRT sangat lemah. Tidak ada pembuatan RUU Perlindungan PRT sebagai inisiasi pemerintah.

Analisa mengenai RPJM 2015 dianggap masih didominasi oleh *employment policy*(kebijakan ketenagakerjaan) dan belum jelas membahas mengenai hak asasi manusia dan hak-hak pekerja. Dalam kondisi perekonomian saat ini yang saling bergantung dengan perekonomian global dan negara belum dapat memenuhi permintaan lapangan pekerjaan bagi buruh migran kebijakan dalam melindungi buruh migran harus menjadi agenda prioritas pemerintah.

Keempat, Analisis penyebab praktek kerja paksa di Arab Saudi: fenomena kerja paksa terhadap TKI Informal (2011-2014). Tenaga kerja migran memang

kerap kali mendapatkan pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran tersebut meliputi kekerasan fisik, psikologis, seksual eksploitasi kerja penahanan dan pemerkosaan. Seperti yang dijelaskan oleh Toby Shelley, bahwa sebagian tenaga kerja mengalami persoalan jam kerja dan pembayaran upah yang buruk selain itu tenaga kerja tinggal tersembunyi di rumah majikannya dan hal ini yang kemudian mendorong semakin maraknya praktik eksploitasi seksual.

TKI dianggap sebagai pahlawan devisa negara, pada tahun 2014 berdasarkan Bank Dunia dan Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) jumlah remitansi hingga mencapai angka 105,5 triliun rupiah. Besarnya remitansi justru berbanding terbalik dengan jaminan keselamatan dan perlindungan dari pemerintah. Pada tahun 2014 Hayanti Mujiono Minarjo yang berasal dari Karawang bekerja kepada majikannya yang berumur 60 tahun selama 7 tahun dan hampir setiap hari mengalami kekerasan fisik seperti pemukulan termasuk dipaksa meminum cairan pembersih lantai. Majikannya kemudian membuang Hayanti di Masjidil Haram dan kemudian diselamatkan KBRI Riyadh yang kemudian Hayanti mendapatkan ganti rugi sebesar 976 juta rupiah. Meski begitu penderitaan Hayanti selama 7 tahun baik mendapatkan kekerasan pemukulan dan tindakan penganiyaan dalam bentuk lain tidak sebanding dengan pemberian ganti rugi.

Dalam dunia internasional, ada organisasi internasional yang fokus terhadap isu pelanggaran hak asasi manusia terhadap buruh migran yaitu ILO. ILO mengatur terkait standar-standar ketenagakerjaan internasional salah satunya dalam bentuk konvensi. Terkait kerja paksa ILO telah membuat dua konvensi yaitu Forced Labour Convention, 1930 (No 29) dan Abolition of Forced Labour

Convention, 1957 (No 105). Secara eksplisit konvensi ini dibentuk bertujuan untuk memberikan perlindungan HAM. Negara-negara anggota juga dituntut untuk mematuhi regulasi yang telah ditetapkan.

Penulis menyebutkan ada tiga penyebab mengapa masih terjadi kerja paksa di Arab Saudi berdasarkan analisis pertimbangan ketidakpastian negara terhadap instrumen hukum internasional, yaitu masih ambigu mengenai Saudi Arabia dalam meyakini norma domestiknya yang cenderung diabaikan ILO dalam tahapan penyebarluasan norma. Selain itu Pemerintah Arab memiliki kapasitas yang terbatas mengenai penghapusan kerja paksa. Pertama ketergantungan akan tenaga kerja migran memberikan kesulitan bagi pemerintah untuk mengaplikasikan kebijakan *saudization*. Kedua, pemerintah mengalami kesulitan untuk dapat melakukan inspeksi maupun pengawasan terhadap pengguna tenaga kerja migran informal. Terakhir, Arab Saudi menghadapi permasalahan lain yang lebih penting dan prioritas dari persoalan penghapusan kerja paksa sehingga penghapusan kerja paksa merupakan prioritas utama Saudi Arabia.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Teori Neoliberalisme

Perkembangan ilmu Hubungan Internasional turut membantu segala permasalahan yang muncul dalam tatanan dunia internasional. Neoliberalisme muncul karena kegagalan liberalisme dalam menjawab persoalan yang muncul dalam dunia internasional yang menekankan pada “Bebas dari kontrol pemerintah”. John Maynard Keynes muncul dengan gagasan baru bahwa pemerintah seharusnya memiliki kontrol dan melakukan intervensi dalam

perekonomian. Asumsi Keynes didukung oleh kebijakan yang dibuat oleh Presiden Roosevelt melalui program “*New Deal*” karena kebijakan ini dapat menyelamatkan warga Amerika pada saat itu yang kemudian membuat peran negara semakin diakui dan diterima.

Namun ternyata Asumsi Keynes juga gagal dibuktikan pada era kapitalisme tahun 1970an yaitu semakin berkurangnya keuntungan yang didapatkan kaum kapitalisme yang berbuntut panjang pada jatuhnya akumulasi kapitalisme sehingga hal ini membuat kembalinya keyakinan pada liberalisme. Milton Friedman dan Friedman muncul dengan gagasan mengenai pentingnya pasar bebas. Mereka menjelaskan bahwa negara seharusnya menjalankan perannya melalui deregulasi, privatisasi dan membuka ruang pihak swasta dalam pasar. Perkembangan ekonomi liberal inilah kemudian mendorong munculnya Neoliberalisme.

Didalam buku Robert Jackson dan Georg Sorenson tahun 2013 yang berjudul “*Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan*” menjelaskan bahwa Neoliberalisme merupakan intitusi dan interdependensi. Pasca perdebatan besar pertama dalam ilmu hubungan internasional tidak dipungkiri realisme merupakan teori yang tetap dominan hingga saat ini. Perdebatan antar liberalisme dan realisme berlanjut namun saat ini ditandai oleh keadaan internasional pasca 1945 dan pengaruh metodologis kaum behavioralis.

Tahun 1950 sampai 1970an hubungan internasional menghadapi realitas mengenai perdagangan dan investasi, perjalanan dan komunikasi dan isu-isu serupa yang terjadi dalam hubungan negara-negara demokrasi Liberal

Barat. Neoliberalisme tetap menggunakan ide-ide yang dijelaskan dalam Liberalisme mengenai kemajuan dan perubahan namun mereka menolak idealisme. Neoliberalisme muncul sebagai pembaharuan yang diformulasikan melalui teori dan metode baru yang ilmiah.

Neoliberalisme muncul sebagai pembaharuan atas ide-ide Liberalisme mengenai integrasi yang menekankan pada fokus kerjasama internasional dan koperasi yang saling menguntungkan. Kaum Neoliberal meyakini bahwa kerjasama di satu wilayah akan memberikan pengaruh pada kerjasama di wilayah lainnya¹⁸. Neoliberalisme merupakan sebuah kebijakan ekonomi daripada sekedar sebuah perspektif ekonomi politik¹⁹. Membahas mengenai kebijakan ekonomi tentu tidak terlepas dari teori yang dikemukakan oleh Adam Smith aliran ekonomi Liberal Klasik yang berasumsi bahwa pemerintah seharusnya memberikan kebebasan ekonomi terhadap rakyatnya melalui pasar bebas baik dalam lingkup domestik maupun internasional.

Menurut David Harvey dalam jurnal "*What is Neoliberalism oleh Dag Einar Thorsen and Amund Lie*" Neoliberalisme merupakan sebuah teori ekonomi yang menekankan pada kesejahteraan manusia yang diciptakan melalui kebebasan dan keterampilan wirausaha individu. Negara harus dapat menjamin berjalannya pasar dengan baik misalnya dengan melindungi hak pribadi. Negara juga dianggap turut bertanggung jawab dalam menjamin pendidikan, perawatan, kesehatan maupun jaminan sosial dan pencemaran

¹⁸Jackson and Sorenson, 2013, *Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan*, hal 79

¹⁹Apridar. 2009. *Ekonomi Internasional (Sejarah, Teori dan Permasalahan dalam Aplikasinya)*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal 23

lingkungan. Namun dalam hal ekonomi pasar intervensi sebuah negara harus dibatasi karena negara tidak dapat menebak-nebak harga pasar.

Asumsi dasar kaum neoliberalis adalah negara merupakan aktor didalam hubungan internasional namun bukan satu-satunya aktor. Dalam hal ini negara merupakan aktor paling penting yang akan mendapatkan keuntungan maksimal dalam segala tujuan. Menurut kaum neoliberal keuntungan dapat dicapai melalui kerjasama. Namun neoliberalisme percaya bahwa negara juga memiliki kepentingannya masing-masing sehingga dalam berjalannya dinamika kerjasama tentu akan muncul permasalahan. Permasalahan yang muncul kerap kali didasari oleh pelanggaran kesepakatan yang dilakukan oleh salah satu negara. Ketika suatu negara merasa dirugikan maka negara akan menggeser loyaltasnya kepada institusi jika dilihat dapat lebih memberikan keuntungan dalam jangka panjang dalam rangka mencapai kepentingan nasionalnya.

Meskipun mengakui keberadaan negara namun Neoliberalisme percaya bahwa dalam persoalan ekonomi peran negara harus dibatasi. Neoliberalisme percaya bahwa peran pemerintah akan membuat pasar tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan privatisasi dan liberalisasi dalam lingkup domestik²⁰.

Tahun 1970an, Robert Keohane dan Joseph Nye mengembangkan ide-ide Neoliberalisme. Mereka berpendapat bahwa hubungan di negara-negara Barat bukanlah aktor satu-satunya Namun hubungan antar masyarakat dan perusahaan-perusahaan transnasional menjadi kentara dan dicirikan sebagai

²⁰*Ibid*

interdependensi kompleks. Situasi ini ditandai dengan kekuatan militer bukanlah sebagai kekuatan utama dalam mencapai kepentingan dalam pembuatan kebijakan luar negeri.

2.2.2 Liberalisme Interdependensi

Interdependensi berarti ketergantungan satu sama lain: rakyat dan pemerintah dipengaruhi oleh apa yang terjadi dimana pun, oleh tindakan rekannya di negara lain.²¹ Artinya ketergantungan timbal balik rakyat dan pemerintah disebabkan oleh apa yang terjadi dimana pun, oleh tindakan rekannya di negara lain. Dengan demikian tingkat tertinggi hubungan transnasional antar negara adalah tingkat interdependensi. Modernisasi meningkatkan interdependensi antar negara, aktor transnasional menjadi penting dan dianggap keberadaannya. Mulanya militer adalah alat untuk mencapai kesejahteraan negara namun saat ini bagi negara-negara industrialis pembangunan ekonomi dan perdagangan merupakan alat dalam mencapai keunggulan dan kesejahteraan dengan sedikit biaya. Interdependensi kompleks mewujudkan hubungan internasional yang lebih damai.

Negara-negara pasca perang yang berhasil secara ekonomi adalah “negara dagang” yaitu seperti Jerman dan Jepang. Mereka tidak lagi mengutamakan anggaran militer mereka yang tinggi dalam mencapai tujuan melainkan memilih berdagang dengan pembagian tenaga kerja internasional yang terus menerus meningkatkan interdependensi.

²¹ Jackson and Sorenson, 2013, *Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan* hal 184.

Hubungan kerjasama merupakan bentuk interaksi antar negara yang ditandai dengan semakin nyatanya hubungan ketergantungan diantara negara-negara. Seiring berjalannya proses globalisasi membuat kebutuhan masyarakat internasional semakin beragam sehingga hal ini membuat setiap negara senantiasa membutuhkan negara lain untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Kaum liberal percaya bahwa pembagian tenaga kerja yang tinggi dalam perekonomian internasional meningkat interdependensi antarnegara. Hal ini dipercaya akan meminimalisir dan mengurangi konflik yang terjadi.

Selama perang dunia kedua David Mitrany seorang fungsionalitas antarnegara yang mengemukakan teori integrasi, berpendapat bahwa interdependensi yang jauh lebih besar dalam bentuk hubungan transnasional antarnegara akan mewujudkan perdamaian. Mitrany juga percaya bahwa kerjasama sudah layak diatur oleh para ahli bidang teknik bukannya politisi.

Ernst Haas mengembangkan teori yang disebut sebagai teori intergrasi internasional neofungsionalitas yang merujuk pada kerjasama yang semakin intensif diantara negara-negara Eropa Barat yang dimulai sejak 1950-an. Arguman Haas didasarkan pada argumen yang dikemukakan oleh Mitrany. Namun Mitrany menolak bahwa masalah teknis dapat dipisahkan oleh politik. Haas menyimpulkan bahwa integrasi regional harus dipisahkan dalam konteks yang lebih besar “teori integrasi kawasan harus disubordinasi pada teori interdependensi”.

Robert Keohane dan Joseph Nye, Jr, power and interdependence menjelaskan mengenai interdependensi kompleks mereka berpendapat bahwa interdependensi kompleks pasca perang secara kualitatif berbeda dari yang terdahulu dan merupakan interdependensi yang sederhana. Politik tingkat tinggi keamanan dan kelangsungan hidup memiliki prioritas atas politik tingkat rendah ekonomi dan masalah sosial. Dalam interdependensi kompleks negara-negara lebih tertarik dengan isu politik tingkat rendah yaitu kesejahteraan dan kurang tertarik dengan politik tingkat tinggi yaitu keamanan nasional.

Interdependensi kompleks menjelaskan bahwa hubungan yang jauh lebih bersahabat dan kooperatif di antara negara. Menurut Keohane dan Nye beberapa konsekuensi muncul, pertama, negara-negara akan mengejar terus tujuan yang berbeda dan aktor-aktor transnasional, seperti LSM dan perusahaan transnasional akan mengejar tujuan mereka sendiri yang telah bebas dari kontrol negara. Kedua, sumber daya kekuatan sering menjadi spesifik pada bidang isu. Ketiga, arti penting organisasi internasional akan semakin meningkat. Dalam interdependensi kompleks aktor-aktor transnasional semakin penting, kekuatan militer merupakan instrumen yang kurang relevan digunakan saat ini dan kesejahteraan menjadi tujuan utama dan kepentingan negara-negara. Hal ini berarti bahwa dunia dari hubungan internasional yang lebih kooperatif

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mencoba menjelaskan permasalahan penelitian untuk mengetahui dinamika hubungan kerjasama Indonesia dan Arab Saudi

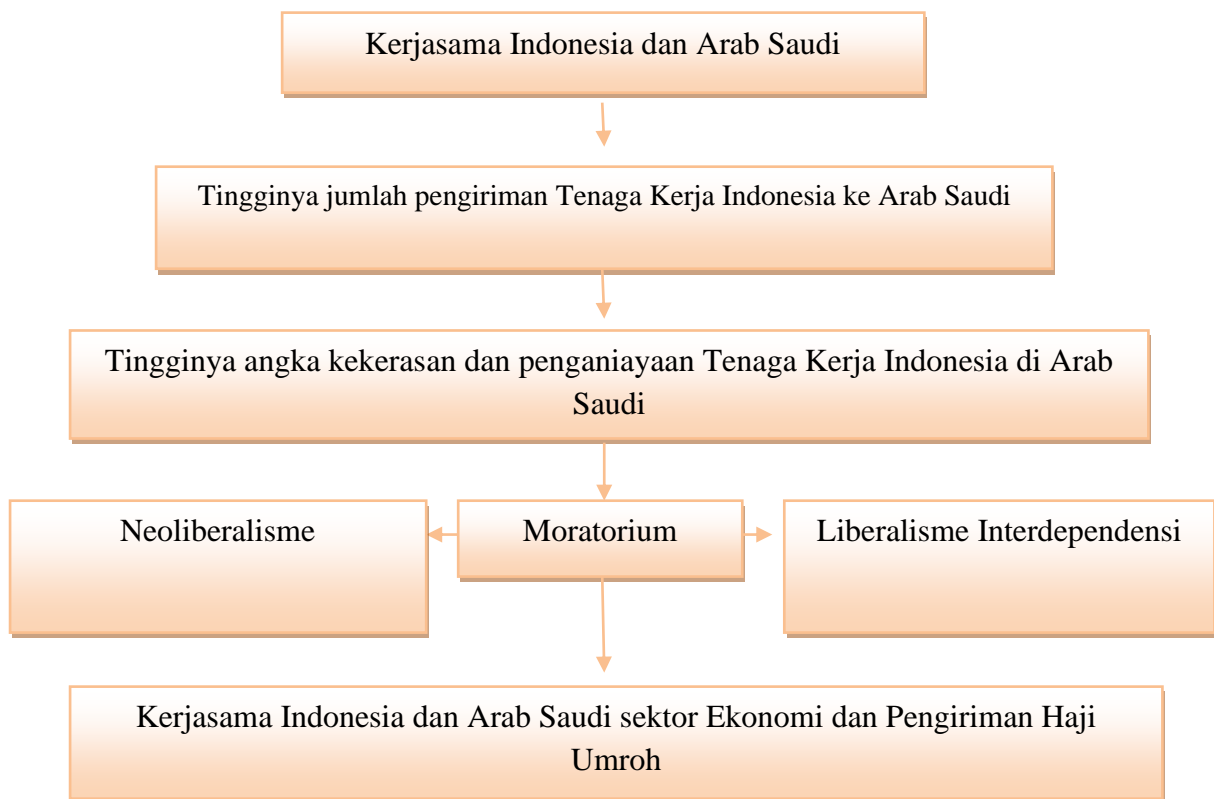
khususnya pasca moratorium tahun 2015 sampai 2018 dengan menggunakan teori neoliberalisme dan konsep liberalisme interdependensi serta kerjasama internasional. Untuk menjelaskan rumusan masalah di atas peneliti menggunakan konsep liberalisme interdependensi yang akan menjawab dinamika kerjasama yang terjadi antara Indonesia dan Arab Saudi dalam berbagai sektor khususnya perekonomian.

Kerjasama Indonesia dan Arab Saudi dalam bidang ekonomi memang sudah terjalin namun belum maksimal. Meski sudah ada pertemuan-pertemuan antara Menteri Perekonomian kedua negara namun sektor ketenagakerjaan memang jauh lebih menonjol antara Indonesia dan Arab Saudi.

Kerangka pikir ini diawali dengan terus meningkatnya pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi. Arab Saudi adalah salah satu negara tujuan utama Tenaga Kerja Indonesia dan bahkan masuk dalam tiga besar negara paling banyak menerima TKI namun ternyata Arab Saudi adalah negara paling banyak terjadi kasus Tki baik kekerasan, penganiayaan maupun kasus pidana tercatat Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki paling banyak kasus termasuk terkait keimigrasian hingga mencapai 10.414 kasus. Kasus ini berkaitan dengan kepemilikan dokumen yang tidak lengkap misalnya penyalahgunaan izin tinggal/visa, telah melebihi masa tinggal, kekerasan fisik, kekerasan seksual, tidak mendapatkan cuti maupun libur, tidak diberikan akses kesehatan, bahkan yang lebih buruk sebanyak 1.111 kasus pidana.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan moratorium yang bertujuan untuk penghentian pengiriman TKI ke Arab Saudi sebagai bentuk protes atas banyaknya kasus penganiayaan dan kekerasan yang terjadi.

Kemudian peneliti menjelaskan dinamika hubungan kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Arab Saudi dalam bidang ekonomi dan pengiriman haji dan umroh. Selanjutnya peneliti mencoba menjelaskan dinamika hubungan kerjasama Indonesia dan Arab Saudi pasca moratorium tahun 2015-2018. Permasalahan tersebut akan diteliti dan akan digabungkan dengan konsep yang akan disusun dalam kerangka pikir.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menemukan berbagai hasil yang tidak diperoleh dengan menggunakan data statistik, sehingga penelitian yang menggunakan metode ini lebih ditekankan untuk mendeskripsikan objek penelitiannya (Strauss, 2003:39). Metode kualitatif berusaha menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.²² Metode penelitian ini digunakan untuk mencocokkan realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif (Moleong, 2014: 131). Melalui metode ini, peneliti memaparkan kejadian tersebut melalui data-data yang telah berhasil dikumpulkan oleh peneliti untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan langkah-langkah berikutnya dalam pengambilan kesimpulan.

Metode penyajian data dalam penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif. Data akan disajikan dalam bentuk penjelasan deskriptif yang berarti menggambarkan atau melukiskan perilaku atau fenomena yang diamati. Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan deksriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. (Lexy J, 2000:3). Penelitian kualitatif dengan analisa deskriptif akan menafsirkan

²² Husaini Usman, 2008. Metode Penelitian Sosial. Hal 79

dan menuturkan data yang bersangkutan dengan pengaruh terhadap suatu kondisi. (Sugiyono, 2012:243).

Selanjutnya penelitian kualitatif akan memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian misalnya perilaku, tindakan, persepsi yang disajikan dengan bentuk kata-kata ataupun bahasa. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mencapai pemahaman tentang membuat arti dari suatu peristiwa, menggambarkan proses, pembuatan makna, dan menggambarkan bagaimana menafsirkan fenomena yang terjadi. Peneliti melakukan pembahasan dengan menggambarkan masalah secara umum terlebih dahulu kemudian menggambarkan masalah secara khusus berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dinamika hubungan kerjasama Indonesia dan Arab Saudi tahun 2014-2018.

3.2 Fokus Penelitian

Untuk menghindari pelebaran pembahasan dan luasnya kajian penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian terhadap dinamika hubungan kerjasama Indonesia dan Saudi Arabia tahun 2014-2018. Hubungan kerjasama Indonesia dan Arab Saudi pada bidang ketenagakerjaan mengalami pasang surut karena tingginya angka kekerasan TKI di Arab Saudi yang kemudian mendorong pemerintah Indonesia melakukan moratorium permanen pada tahun 2015. Pasca ditutupnya pasar tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi peneliti menjelaskan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi pada bidang ekonomi yang semakin erat dan kerjasama bidang haji dan umroh yang tetap stabil. Oleh karena

itu dalam penelitian ini menjelaskan dinamika hubungan kerjasama Indonesia dan Arab Saudi tahun 2014-2018. Penelitian ini menggunakan konsep yang telah dipilih oleh peneliti. Konsep yang telah dipilih adalah konsep liberalisme interdependensi.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Penulis memperoleh data tersebut melalui berbagai sumber diantaranya adalah: jurnal, buku, laporan tertulis dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti terutama yang berkaitan dengan hubungan kerjasama Indonesia dan Arab Saudi pada tahun 2014-2018

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Valid atau tidaknya suatu penelitian tergantung pada jenis – jenis pengumpulan data yang digunakan sebagai pemilihannya menggunakan metode yang sesuai yang berasal dari sumber data (Bagong, 2005:186). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Literatur, yaitu pengumpulan data dari sejumlah literatur berupa buku, jurnal, artikel, dan surat kabar.
2. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen resmi, seperti data yang dihimpun melalui laporan, data hasil pertemuan KTT Indonesia dan Arab Saudi, laporan dan data dari pemerintah kedua negara serta pihak yang berkaitan dan dapat diakses melalui internet.

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman langkah yang dilakukan untuk menganalisis data melalui tiga tahapan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan deskriptif mengenai dinamika hubungan kerjasama Indonesia dan Saudi Arabia Tahun 2014-2018.

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang dapat diperoleh dari hasil dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori yang kemudian dijabarkan ke dalam unit-unit (Sugiyono, 2012:244). Setelah dibagi menjadi kategori, dilanjutkan dengan menyusun ke dalam pola sehingga peneliti akan mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti dan dapat dipahami oleh pembaca.

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman, analisis dalam penelitian kualitatif merupakan suatu proses kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, berkesinambungan, dan interaktif yang disebut dengan *cyclical analysis* (Tresiana, 2013:119). Model ini memiliki empat tahapan analisis sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan Data

Kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data/informasi terkait kerjasama Indonesia dan Saudi Arabia pada tahun 2014-2015.

- 2). Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data awal yang ada dalam bentuk catatan dan dokumen (Tresiana, 2013:120). Dalam tahap ini, data mentah yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber baik wawancara, buku, dokumen, dan gambar terkait kerjasama Indonesia dan Saudi Arabia dan

dipusatkan pada kerjasama ketenagakerjaan, ekonomi dan haji umroh tahun 2014-2018.

3). Tampilan Data

Kegiatan penyajian data/informasi dalam bentuk yang terorganisasi dengan baik sehingga kegiatan pengambilan kesimpulan dalam bentuk narasi atas kategori dan pola tertentu menurut pandangan informan dapat dilakukan (Tresiana, 2013:120). Dalam tahap ini, data-data yang telah direduksi akan ditampilkan dan siap untuk dianalisis.

4). Penarikan Kesimpulan

Kegiatan pembuatan kesimpulan dalam bentuk narasi berdasarkan data-data dan melakukan interpretasi berdasarkan sudut pandang peneliti dengan mengkaitkan teori dan konsep yang digunakan oleh peneliti. Peneliti menafsirkan makna dari masing-masing data yang didapat. Setelah mendapatkan makna dari masing-masing tersebut, peneliti menyusunnya dalam kalimat sistematis yang kemudian data tersebut merupakan dukungan bagi argumen peneliti. Makna penting yang didapatkan peneliti dari data literatur dan dokumen resmi dikaitkan dengan konsep liberalisme interdependensi.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Kerjasama Indonesia dan Arab Saudi

Arab Saudi atau *Kingdom of Saudi Arabia* adalah negara yang berada di Timur Tengah. Arab Saudi memiliki dua pesisir yaitu Laut Merah dan Teluk Persia, dan sebagian besar wilayah Arab Saudi merupakan gurun pasir.²³ Arab Saudi adalah negara dengan sumber daya alam yang melimpah dan penghasil minyak terbesar. Beberapa tempat utama cadangan minyak bumi Arab Saudi berada di Dahrhan, Ghawar, Hassa, Riyadh, Abqaq dan Dammam dengan pelabuhan utama di Kota Restanura (Teluk Persia) yang juga terdapat di Damman dan Jeddah.²⁴

Arab Saudi memiliki perusahaan minyak raksasa di dunia yaitu Saudi Aramco yang merupakan salah satu perusahaan terbesar di dunia dengan pendapatan yang sangat besar.²⁵ Aramco menjadi perusahaan besar dunia selama puluhan tahun dalam eksplorasi, penyulingan, distribusi dan pemasaran hidrokarbon. Selain itu infrastruktur produksi minyak dan gas Saudi Aramco memimpin dalam menghasilkan produksi, kehandalan operasional, dan kemajuan teknis.²⁶ Transisi pertumbuhan Arab Saudi sangat di dukung oleh pemasukan minyak bumi selain pendapatan yang berasal dari pengiriman haji dan umroh.

²³ Riyan Hidayat. 2015. Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam.

²⁴ *ibid*

²⁵ The Wall Street Journal. 2016. "Could Saudi Aramco Be Worth 20 Times Exxon?".

²⁶ Saudi Aramco Official. Diakses di <http://www.saudiaramco.com/en/home/about/who-we-are.html>

Perekonomian Arab Saudi kemudian menjadikan Arab Saudi menjadi salah satu negara maju.²⁷

Sistem Pemerintahan Arab adalah negara islam dengan berdasar kepada hukum Islam (Syariah) yang berpedoman pada kitab Suci Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Hukum dan keputusan kebijakan Arab Saudi seringkali berdasarkan hukum Islam. Hal ini kemudian membuat Arab Saudi menjalin kerjasama dengan negara-negara muslim lainnya seperti Indonesia. Hubungan Indonesia dan Arab Saudi sudah sangat erat karena Arab Saudi adalah tempat kelahiran islam sedangkan Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Keduanya tergabung sebagai anggota Organisasi Kerjasama Islam dan Ekonomi utama G-20. G20 (kelompok dua puluh) merupakan forum internasional bagi pemerintah dan gubernur bank sentral dari 19 negara dan Uni Eropa yang bertujuan untuk membahas kebijakan yang berkaitan dengan promosi stabilitas keuangan internasional.

Kerjasama Indonesia dan Arab Saudi di tandai atas pembukaan kantor resmi Kedutaan Besar Indonesia di Jeddah pada tahun 1948²⁸. Namun pada tahun 1985 Kedutaan Besar Republik Indonesia dipindahkan dari Jeddah ke Riyadh yang kemudian statusnya diubah menjadi Konsulat Jendral Indonesia²⁹. Arab Saudi adalah salah satu negara yang mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1945. Tahun 1950 Arab Saudi membuka kantor perwakilan di Indonesia yang disusul

²⁷ Simmons, Matthew R. 2005. "Twilight In The Desert: The Coming Oil Saudi Shock and The World Economy". New jersey: John Wiley & Sons, Inc.

²⁸ Ministry of Foreign Affairs. Diakses melalui <https://www.kemlu.go.id/en/berita/berita-perwakilan/Pages/Broadening%20Indonesia-Saudi%20bilateral%20relations.aspx> pada pukul 19.34

²⁹ *Ibid*

menjadi kedutaan resmi. Tepat pada tahun yang sama secara resmi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Arab Saudi terjalin.

Meningkatnya intensitas hubungan kerjasama Indonesia dan Arab Saudi kemudian terbentuklah perjanjian kerjasama secara resmi yang mengikat antar keduanya. Pada 24 November 1970 terbentuk perjanjian *Treaty of Friendship between The Republic of Indonesia an The Kingdom of Saudi Arabia* yang ditandatangani di Jeddah oleh Indonesia yang diwakili oleh Dubes Aminuddin Aziz dan Arab Saudi oleh Menlu Omar Sakkaf.³⁰ Perjanjian tersebut kemudian diratifikasi melalui UU No 9 pada 18 September 1971 LN No 77 tambahan LN NO 2971.³¹ Perjanjian tersebut kemudian membawa Indonesia dan Arab Saudi ke dalam hubungan yang lebih erat dengan menciptakan kerjasama di berbagai sektor seperti Ekonomi dan perdagangan, Ketenagakerjaan, perlindungan hak-hak pekerja migran, dan pelaksanaan ibadah haji dan umroh.

Kerjasama dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh dan ketenagakerjaan merupakan salah satu kerjasama yang cukup menonjol. Pada tahun 1970 Pemerintah Indonesia mengadakan program penempatan TKI ke Luar Negeri dengan tujuan memenuhi permintaan tenaga kerja dari luar negeri dan memenuhi tingginya permintaan TKI yang ingin berkerja diluar negeri. Kemudian pada tahun 1975 Pemerintah Indonesia mulai melakukan pengiriman TKI ke Arab Saudi. Pada awal tahun pengiriman TKI hanya berjumlah 25 orang kemudian naik pada tahun 1976 sebanyak 480 orang dan terus meningkat tajam pada tahun 1977 sebanyak 2.838 dan terus mengalami peningkatan hingga saat ini.

³⁰ Perjanjian persahabatan Indonesia dan Arab Saudi diakses melalui <http://www.aksesindeplu.com/merajut%20ukhuwah%20menjerat%20TKI>.

³¹ Kementerian Luar Negeri. Perjanjian Internasional. Diakses melalui: <http://kemlu.go.id>

Meski pengiriman TKI ke Arab Saudi selalu menunjukkan peningkatan namun Arab Saudi adalah negara dengan jumlah kasus TKI paling tinggi. Kasus-kasus ini meliputi penganiayaan, pelanggaran HAM, kekerasan seksual, fisik maupun kekerasan psikologis, eksploitasi kerja, penahanan, serta permasalahan terkait pembayaran upah dan jam kerja. Berdasarkan laporan KJRI Jeddah kasus yang terjadi pada tahun 2010 hingga mencapai 1.546 kasus.³² Tahun 2011 hubungan diplomatik Indonesia dan Arab Saudi tidak cukup baik karena kasus-kasus hukum yang di alami WNI seperti hukuman mati maupun eksekusi.

Kasus yang menimpa Ruyati adalah salah satu kasus yang cukup menarik perhatian penduduk dan Pemerintah Indonesia. Ruyati dijatuhi hukuman pancung, namun hukuman ini ternyata tidak sesuai prosedur yang seharusnya berlaku. Pasalnya Arab Saudi melakukan eksekusi tanpa pemberitahuan Pemerintah Indonesia lebih dahulu. Perwakilan Indonesia di Arab Saudi kemudian melakukan protes keras melalui Pejabat Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah bagian Perlindungan WNI, Didi Wahyudi kepada Pemerintah Arab Saudi karena telah melanggar konvensi Wina tahun 1963 yang berisi bahwa satu negara harus memberitahukan penahanan, penyidikan, sidang pengadilan sampai eksekusi hukuman atas warga negara lain.³³

Kasus Ruyati kemudian bergulir cukup panjang dengan pemanggilan Duta Besar Arab Saudi di Jakarta dan Duta Besar Indonesia di Arab Saudi. Yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan melakukan diskusi antara

³² Suprayogi, A 2013. "Malaysia dan Arab Saudi". Negara Kasus TKI Tertinggi, diakses melalui (<http://news.liputan6.com/read/624151/malaysia-dan-arab-saudi-negarakasus-btki-tertinggi>).

³³ Pemancungan Ruyati, RI protes Arab Saudi. 19 Juni 2011. Diakses melalui https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/06/110619_ruyati_saudi

perwakilan kedua negara. Konsulat Jenderal RI di Jeddah, Didi Wahyudi memberikan pernyataan bahwa “ditangkap, diinvestigasi, diadili, dijatuhi hukuman mati, sampai dilaksanakan hukuman mati, sama sekali tidak ada pemberitahuan resmi sekalipun kita meminta akses agar kita dapat mewakili kepentingan yang bersangkutan”.³⁴

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu juga memberikan pernyataan bahwa Arab Saudi telah menabrak norma hubungan internasional dengan tidak menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu terkait pelaksanaan eksekusi Ruyati.³⁵ Tindakan Arab Saudi kemudian menimbulkan kisruh antara Indonesia dan Arab Saudi. Permasalahan ini berbuntut pada tindakan tegas Indonesia dengan melakukan Soft Moratorium pada Agustus 2011 dan Moratorium Permanent pada tahun 2014 dan belum dicabut hingga saat ini. Meski begitu hukuman eksekusi mati tetap menjadi masalah bagi kedua negara. Tercatat pada tahun 2015 setidaknya terjadi 158 eksekusi, tahun 2016 154 eksekusi dan tahun 2017 sebanyak 146.³⁶

Pasca ditutupnya pengiriman TKI ke Arab Saudi, Indonesia tetap menjalin serta mempertahankan berbagai kerjasama dengan Arab Saudi hingga saat ini. Pada tahun 2015 dalam kunjungan kepresidenan Presiden Joko Widodo diberikan kehormatan tertinggi bagi kepala negara asing oleh Arab Saudi di Istana Al-Salam Jeddah yaitu Medali King Abdul Aziz.³⁷ Medali ini berikan kepada kepada

³⁴ IBid

³⁵ Kisruh TKI, RI dan Arab saling membutuhkan. 2 Agustus 2011. Diakses melalui https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/08/110802_tkigeneral

³⁶ Hukuman Mati di 2017: Fakta dan Angka”. Amnesty International.

³⁷ Broadening Indonesia-Saudi Bilateral Relation. Diakses melalui <http://live.saudigazette.com.sa/article/161484/Broadening-Indonesia-Saudi-bilateral-relations> pada pukul 21.12

Indonesia sebagai bentuk penghargaan atas kerjasama yang kuat yang telah terjalin sejak 1947. Kunjungan ini menunjukkan sinyal positif karena ini merupakan kunjungan pertama Raja Arab Saudi setelah 47 Tahun lalu sejak kunjungan Raja Faisal bin Abdulaziz Al-Saud kepada Presiden Soeharto pada saat itu. Kunjungan ini juga membahas beberapa persoalan dan isu internasional serta strategi penyelesaiannya. Bentuk komitmen Indonesia dan Arab Saudi dalam menanggapi isu internasional dan kepentingan bersama kemudian dilanjutkan pada kunjungan resmi Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel Al-Jubair pada Oktober 2015.³⁸

Pada 22 Mei 2016, pangeran Arab Saudi Alwaleed bin Talal bin Abdulaziz Al-Saud sekaligus merupakan Chairman of Kingdom Holding Company melakukan kunjungan ke Indonesia. Dalam kunjungan ini Arab Saudi ingin melakukan investasi kingdom holding terhadap Indonesia. Kunjungan-kunjungan kenegaraan Indonesia dan Arab Saudi semakin intens. Hubungan kerjasama Indonesia dan Arab Saudi kemudian semakin erat dengan dibentuknya sidang komisi yang diperuntukkan sebagai wadah dalam membahas perkembangan kedua negara baik bidang ekonomi, sosial, budaya, agama, perdagangan, investasi dan ketenagakerjaan. Pada tahun 2017 Raja Arab Saudi melakukan kunjungan ke Indonesia dalam rangka penandatanganan MoU yang membahas mengenai kerjasama dalam bidang keamanan, pendidikan, perdagangan, perikanan, terkait islam, UKM, infrastruktur, budaya dan penerbangan sipil³⁹. Ketua DPR RI Setya Novanto pada saat itu menyambut baik kedatangan Raja Arab Saudi karena

³⁸ Ibid

³⁹ Kerjasama Indonesia-Arab Saudi Sinyal Positif Dunia Investasi diakses melalui <https://www.liputan6.com/news/read/2873840/kerjasama-indonesia-arab-saudi-sinyal-positif-dunia-investasi> pada pukul 23.01

dianggap dapat meningkatkan hubungan bilateral dan dapat meningkatkan nilai dagang serta investasi kedua negara. Dalam kunjungan tersebut setidaknya ada 11 butir kesepakatan antara Indonesia dan Arab Saudi, diantaranya adalah⁴⁰ :

Tabel 4.1 Nota Kesepahaman Indonesia dan Arab Saudi Tahun 2017

	Description of Mou	Ministry(s) in charge
1	Improvement of the position of joint commision chairperson	Ministry of Foreign Affairs of both countries
2	Saudi Funding to development project	Ministry of Finance, Saudi Fund Development
3	Memorandum on cultural cooperation	Ministry of Education and Culture of RI, Ministry of Culture and Information of Saudi
4	Programmes on the development of small and medium enterprises	Ministry of Cooperatives and SMEs of RI, the Small and Medium Enterprises Authority of Saudi
5	Memorandum of health cooperation	Ministry of Health of both countries
6	Memorandum of aeronautical development	Ministry of transport RI, Saudi Authority
7	Programme for cooperation in the field of	Ministry of Research

⁴⁰ ISEAS Yusof Ishak Institute. 2017. *List of Memorandum of Understanding (MoU) between Indonesia and Saudi Arabia*.

	scientific cooperation and higher education	Technology and Higher Education RI, Ministry of Education of Saudi Arabia
8	Memorandum of Da'wah and guidance from kingdom of Saudia Arabia	Ministry of Religious Affairs RI, Ministry of Islamic Affairs of Saudi Arabia
9	Memorandum in the field of marine and fisheries cooperation	Ministry of Trade of both countries
10	Trade cooperation programme	Ministry of Trade of both countries
11	Cooperation in handling interstate crime (transnational crime)	Police Departmen of both countries

Sumber: Setneg.go.id

4.2 Sektor Kerjasama Indonesia dan Arab Saudi

4.2.1 Pengiriman Haji dan Umroh

Kementrian Haji dan Wakaf didirikan tahun 1381 Hijriah. Kementrian ini berperan dalam memberikan pengawasan atas seluruh urusan haji dan wakaf, masjidil haram, masjidil nabawi dan masjid-masjid lainnya. Namun pada 1414 Hijriah Wakaf dipisah dan diubah menjadi Kementrian Keislaman, Wakaf, dan Bimbingan. Sedangkan Kementrian Haji memiliki tanggung jawab dengan menjalankan kebijakan negara dalam bidang pelayanan tamu Allah yang datang untuk menunaikan ibadah haji,

umrah atau berziarah ke masjid Rasulullah serta bertugas memberikan usulan menyiapkan sistem dan skedul kerja dan mengontrol kinerja pihak-pihak swasta yang dibawahnya agar berjalan dengan baik.

Hubungan kerjasama pengiriman haji dan umrah menjadi salah satu kerjasama paling menonjol dan berjalan stabil antara Indonesia dan Arab Saudi. Hal ini disebabkan oleh Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi penduduk umat islam terbesar sehingga Indonesia merupakan salah satu mitra penting bagi Arab Saudi dalam pengiriman haji. Antusias umat islam terutama di Indonesia dapat terlihat dari jumlah peningkatan jamaah haji yang terus meningkat. Bagi Arab Saudi pengiriman haji dan umroh merupakan sektor potensial, pada tahun 2010 pendapatan Arab hingga 33% dan naik secara signifikan pada tahun 2015 hingga 51% dengan jumlah jamaah haji Indonesia sebanyak 300.000-400.000 setiap tahunnya.⁴¹

Indonesia adalah negara dengan populasi umat muslim terbesar di dunia. Total penduduk pada tahun 2010 adalah 237.641.326 yaitu hingga 87,81% merupakan umat muslim.⁴² Dalam hal ini Arab Saudi merupakan negara yang memiliki tempat-tempat suci umat islam seperti Madinah, Mekkah dan Jeddah. Tempat- tempat ini adalah tujuan bagi umat muslim untuk melakukan ibadah haji maupun umroh. Tahun 2015 jamaah haji Indonesia mencapai 156.342 yang terdiri dari 85.793 jamaah perempuan dan

⁴¹ Mengharap keuntungan ekonomi hubungan Indonesia-Saudi diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39104120> pada pukul 22.54

⁴² Kemetrian Kesehatan RI. Diakses di <http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/lain-lain/analisis%20haji%20indonesia%202017.pdf>

70.425 jemaah laki-laki.⁴³ Pemberangkatan jemaah haji Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada tahun sebelumnya yaitu pada 2014 jemaah haji mencapai 156.332 dan pada tahun 2016 meningkat hingga mencapai 160.177 jemaah. Pada tiga kurun waktu terakhir jumlah jemaah haji yang berangkat didominasi oleh kaum wanita.

Pada tahun 2017 menurut Duta Besar Indonesia di Arab Saudi Agus Maftuh Abegail jumlah jemaah haji naik 480 ribu atau menjadi 1,8 juta dibandingkan tahun 2016 atau naik hingga 33%.⁴⁴ Peningkatan jumlah jemaah setiap tahunnya tentu menodorong pertumbuhan ekonomi Arab Saudi. Selain kerjasama haji dan umrah Indonesia dan Arab Saudi juga telah menjalin kerjasama ekonomi meski belum terlalu signifikan seperti haji dan umroh.

Haji dan Umrah menjadi potensi besar yang di miliki oleh Arab Saudi untuk meningkatkan ekonomi negara selain minyak. Menurut Sean McLoughlin, dosen senior bidang agama, antropologi dan islam di Universitas Leeds di Inggris 75% jemaah haji berasal dari Indonesia, Turki, Nigeria, mesir, Iran, banglades dan Pakistan.⁴⁵ Pada tahun 2017, Umrah berhasil menarik delapan juta penziarah dengan menghasilkan US \$ 4 miliar bagi Arab Saudi sedangkan pendapatan haji mencapai US \$ 8 miliar.⁴⁶ Indonesia menjadi negara paling banyak dalam mengirim jemaah. Pada

⁴³ Ibid

⁴⁴ Peningkatan jemaah haji. Diakses melalui <https://haji.okezone.com/read/2017/08/31/392/1767111/wow-jumlah-jemaah-haji-2017-meningkat-jadi-hampir-2-juta>. pada pukul 19.32

⁴⁵ The annual pilgrimage of muslims to Mecca is a massive logistical challenge for Saudi Arabiam, which has been making significant invesment in infrastucture. 1 july 2018

⁴⁶ Indonesia sends biggest number of pilgrims in history. Diakses melalui <http://saudigazette.com.sa/article/515844>

tahun 2017 Indonesia mengirim hingga 221.000 kemudian Pakistan sebanyak 179.000 sementara Mesir 108.000 dan Nigeria 79.000 jamaah.

Tingginya minat Warga Negara Indonesia tentu saja memberikan keuntungan bagi Arab Saudi. Menurut Konsulat Jenderal Indonesia Mohammad Hery Saripudin sebanyak 221.000 jamaah haji Indonesia tahun 2017 adalah jumlah terbesar yang pernah datang untuk haji dari negara asing dalam sejarah di Arab Saudi.⁴⁷ Bukan hanya dianggap sebagai perjalanan religius namun sebagai keuntungan ekonomi bagi Arab Saudi karena dapat meningkatkan sektor pariwisata. Tidak hanya keuntungan yang dirasakan oleh negara namun memberikan keuntungan bagi penduduk di sekitar tempat-tempat suci.

Penduduk disekitar dapat mengembangkan bisnis seperti perhotelan, agen perjalanan, unit bimbingan ziarah, maupun agen ketring. Eratnya hubungan kerjasama Indonesia dan Arab Saudi dibidang haji dan umrah makin intens hingga memperkuat kerjasama ekonomi digital pada tahun 2019.⁴⁸

Indonesia dan Arab Saudi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dalam rangka memperkuat kerja sama ekonomi digital terkait pengiriman haji dan umrah. Indonesia di wakili oleh Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara dan Arab Saudi oleh Menteri Komunikasi dan

⁴⁷ ibid

⁴⁸ Indonesia and Saudi Arabia strengthen digital economic cooperation diakses melalui <https://www.opengovasia.com/indonesia-and-saudi-arabia-strengthen-digital-economic-cooperation/>

Teknologi Informasi Abdullah Alswaha yang menyatakan ada potensi besar dalam kerjasama ekonomi digital.

4.2.2 Kerjasama Ekonomi

Terkait sektor ekonomi pada 7 Agustus 2003 RI dan Kerajaan Arab melakukan pertemuan ke-7 dalam agenda pembicaraan pada sektor ekonomi dan perdagangan. Pada 18 Desember 2010 Delegasi Kementerian Ekonomi melakukan kunjungan kerja ke Riyadh yang di pimpin oleh Rizal Affandi Lukman selain itu juga melakukan pertemuan dengan Dr. Ahmad Habib yaitu Menteri Ekonomi dan Kementerian Ekonomi Arab Saudi.

Dalam hubungan kerjasama ekonomi dan perdagangan kemudian tercipta Middle East Update pada 23-24 Maret 2010 di Medan, 29-30 Maret 2010 di Bandung dan Juni 2010 di Pontianak serta 11-12 Oktober 2010. Serta menghadirkan pengusaha Arab Saudi melalui INACRAFT pada 21-25 April 2010. INACRAFT (The Jakarta International Handicraft Trade Fair) yang merupakan wadah bagi produsen dan eksportir handicraft.

Peningkatan kerjasama dalam banyak sektor ini juga memberikan sinyal potensial bagi perusahaan-perusahaan nasional untuk dapat terlibat. Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi umat muslim terbesar sehingga diharapkan dapat meningkatkan total ekspor produk halal dalam negeri ke Arab Saudi. Kemudian hal tersebut akan mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menarik investasi asing. Kerjasama ini diharapkan mampu memberikan keuntungan

maksimal bagi kedua negara sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kerjasama dalam bidang ekonomi ternyata menjadi fokus Indonesia dan Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir.

Fokus kerjasama pada bidang ekonomi termasuk perdagangan dan investasi merupakan tujuan Indonesia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi serta dapat memberikan angin positif bagi perekonomian Indonesia. Melalui Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita Indonesia telah menandatangani Cooperation Program in the Field of commerce dengan Menteri Perdagangan dan Investasi Arab Saudi yang diwakili Minister of State and Member of Council of Ministers Ibrahim bin Abdulaziz Al Assaf yang dilakukan di Istana Bogor yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Raja Salman.⁴⁹ Program kerjasama yang telah disepakati tersebut merupakan turunan dari Economic and Technical Cooperation Agreement between Republic of Indonesia and the Kingdom of Saudi Arabia yang ditandatangani pada 1981 oleh kedua negara.⁵⁰

Pada 22 Desember 2016 melalui Direktur utama Pertamina, Dwi Soetjipto dan Presiden Direktur Saudi Aramco Amin Naseer dikantor pusat Pertamina di Jakarta Indonesia dan Arab Saudi sepakat berkerjasama dalam mengembangkan kilang pertamina di Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) merupakan

⁴⁹ Siaran Pers, Biro Hubungan Masyarakat. Diakses melalui <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2017/03/06/kunjungan-raja-salman-mendag-arab-saudi-fokus-penting-ekspor-nasional-id0-1488769446.pdf> pada pukul 23.45

⁵⁰ Ibid

perusahaan minyak terbesar di Arab Saudi.⁵¹ Penandatanganan perjanjian Pengembangan Usaha Patungan (JVDA) ini senilai \$6miliar. Kerjasama ini ditujukan untuk dapat memenuhi permintaan energi nasional. Selain Cilacap RDMP juga akan dikembangkan di Kilang Balikpapan Kalimantan Timur, Dumai Riau dan Balongan Jawa Barat. Dalam perjanjian tersebut Pertamina maupun Saudi Aramco memegang saham 55% dan 45% saham.

52

Berdasarkan kesepakatan perjanjian pengembangan kilang minyak yang di gadang terbesar di Indonesia yaitu di Cilacap kedua negara sepakat untuk meningkatkan kapasitas Kilang Cilacap yang saat ini 348.000 barel per hari yang kemudian akan ditingkatkan menjadi 400.000 barel per hari. Saudi Aramco sepakat untuk menjadi mitra pemasok minyak mentah untuk kilang di Cilacap hingga saat ini konfigurasi kilang yang ditingkatkan dan pekerjaan Desain Rekayasa Bersama telah selesai dan startup ditargetkan pada tahun 2021. Kerjasama ini penting bagi kedua negara, Indonesia harus memenuhi keamanan energinya sedangkan Arab Saudi mengamankan pasarnya dengan memasok minyak secara berkelanjutan ke kilang. Kerjasama Indonesia dan Arab Saudi semakin di garap dengan serius dengan kedatangan Kerajaan Arab Saudi ke Indonesia pada tahun 2017.

Kunjungan Raja Salman pada tahun 2017 merupakan bagian dari strategi ekonomi Arab Saudi dalam mewujudkan Visi Arab Saudi 2030.

⁵¹ Saudi Gazzete, Saudi-Indonesian relations reach new heights. Oktober 2018

⁵² Ibid

Visi Arab Saudi 2030 adalah strategi pemerintah dalam mengurangi ketergantungan ekonomi Arab Saudi terhadap minyak bumi. Cara tersebut disebut sebagai Arab Saudi pasca era energi. Arab Saudi membuka kerjasama dengan negara negara khususnya yang berasal dari Asia. Kunjungan Raja Salman ke Indonesia pada tahun 2017 diperkirakan menjadi investasi besar yang dilakukan Arab Saudi karena melakukan penanaman modal sebesar US\$ 25 Milliar atau sekitar Rp 333 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa kerjasama Indonesia dan Arab Saudi pada bidang ekonomi semakin intens.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian yang berjudul “dinamika hubungan kerjasama Indonesia dan Arab Saudi pasca moratorium tahun 2014-2018”. Berikut kesimpulan diantaranya adalah :

1. Dinamika hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi yang terjalin pada bidang ketenagakerjaan mulanya menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Sejak tahun 1975 Indonesia mulai mengirim tenaga kerja dan terus menunjukkan peningkatan pengiriman tenaga kerja hingga saat ini. Namun dalam perjalanannya hubungan kedua negara mengalami pasang surut. Tingginya angka kekerasan dan penganiyaan yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi yang kemudian pada tahun 2011 Indonesia melakukan soft moratorium. Hal ini adalah bentuk peringatan kepada Arab Saudi untuk dapat memberikan jaminan keselamatan bagi TKI Selain menuntut keselamatan TKI, kedua negara juga sepakat untuk melakukan pembenahan pada kedua pihak. Namun ternyata hal ini tidak membuat Arab Saudi melakukan kebijakan apapun untuk dapat melindungi TKI. Semi moratorium yang telah dilakukan Indonesia pada tahun 2011 kemudian dipermanenkan melauai surat keputusan menteri tenaga kerja

yang ditandatangani pada 4 Mei 2015. Moratorium permanen adalah tidak ada pengiriman TKI resmi dari pemerintah Indonesia.

2. Sejak diberhentikannya pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi peneliti menjelaskan lebih dalam hubungan kerjasama dalam bidang haji dan umroh serta ekonomi yang meliputi ekspor, impor dan neraca perdagangan. Total ekspor Indonesia yang turun tajam pada tahun 2016 sampai 2018 dipengaruhi oleh rendahnya daya beli Arab Saudi yang disebabkan oleh fluktuasi harga minyak yang tidak menentu yang berimplikasi pada perekonomian Arab Saudi. Hal yang sama juga terjadi pada sektor impor Arab Saudi yang turun terhadap Indonesia. Hal ini juga disebabkan oleh Menurunnya daya beli Arab Saudi akibat dari terpuruknya perekonomian Arab Saudi dan turunnya harga minyak menekan perdagangan kedua negara.
3. Penguatan hubungan kerjasama Indonesia dan Arab Saudi, kedua negara membentuk berbagai kerjasama termasuk ekonomi, yaitu investasi dan perdagangan. Kunjungan Kerajaan Arab Saudi, Raja Salman pada tahun 2017 menjadi momentum bagi penguatan kerjasama Indonesia dan Arab Saudi pada bidang ekonomi kedua negara yang didukung oleh berbagai perjanjian dan MoU. Tercatat kedatangan ini menghasilkan 11 MoU yang telah ditandatangani pada 2017. Kemudian hubungan religius yang erat antara dua negara dimana Arab Saudi merupakan negara tempat kiblat seluruh umat muslim, serta dengan Indonesia adalah negara dengan mayoritas muslim terbesar didunia. Membuat Arab Saudi dan Indonesia

memiliki ikatan kerjasama keagamaan yang kuat sejak dulu yang meliputi haji dan umroh.

4. Peneliti menganalisis dinamika hubungan kerjasama Indonesia dan Arab Saudi menggunakan konsep liberalisme interdependensi. Untuk mencapai keunggulan dan kesejahteraan dengan sedikit biaya negara industrialis membangun ekonomi dengan melakukan perdagangan internasional. Perdagangan internasional mewujudkan hubungan interdependensi atau hubungan ketergantungan satu sama lain. Interdependensi yang tinggi mewujudkan perdamaian. Hubungan interdependensi antara Indonesia dan Arab Saudi dapat dilihat dalam neraca perdagangan antara kedua negara dimana Indonesia selalu surplus dalam bidang nonmigas dan Arab Saudi selalu surplus dalam bidang migas. Indonesia bergantung pada sektor migas dan Arab Saudi bergantung pada sektor migas. Pada bidang haji dan umroh Indonesia merupakan salah satu pengirim turis haji dan umroh terbesar mengingat bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi umat muslim terbesar di dunia. Bahkan Indonesia menjadi salah satu yang mendapatkan keuntungan dengan total kuota haji paling tinggi dibandingkan dengan negara lain. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia adalah mitra potensial bagi Arab Saudi sedangkan Indonesia terus melakukan upaya penguatan kerjasama dalam bidang ini juga terus dilakukan mengingat kuota haji yang terbatas serta masa tunggu haji yang lama. Meski begini Indonesia terus berupaya untuk terus meningkatkan hubungan kerjasama dalam bidang haji dan umroh mengingat bahwa kakkah hanya ada di Arab Saudi.

6.2 Saran

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini memiliki banyak kekurangan baik berdasarkan faktor-faktor yang belum diteliti, disebabkan oleh waktu, dan data. Maka dari itu peneliti memiliki saran-saran yang berguna untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu dinamika hubungan kerjasama Indonesia dan Arab Saudi tahun pasca moratorium tahun 2015-2016. :

1. Peneliti memberi saran untuk meneliti lebih jauh hubungan kerjasama apa saja yang terjalin antara Indonesia dan Arab Saudi.
2. Ketegangan hubungan kerjasama Indonesia dan Arab Saudi pada bidang ketenagakerjaan akibat tingginya angka kekerasan TKI hingga memicu munculnya kebijakan moratorium dapat menjadi bahan rujukan bagi pemerintah Indonesia maupun Arab Saudi untuk bersama melakukan pembenahan dalam proses dan regulasi pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi.
3. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi harus terus terjalin dan terus diupayakan dalam mewujudkan lingkungan eksternal yang menunjang dalam rangka mengembalikan serta memulihkan perekonomian Arab Saudi yang bergantung pada fluktuasi harga minyak dunia dan kepentingan pembangunan bagi Indonesia.
4. Hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi pada dasarnya negara sama-sama ingin mengambil keuntungan dari kerjasama ini oleh karena itu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi kedua negara maka negara harus

memperkuat kerjasama serta mengeksplorasi hubungan ini sehingga dapat terjalin pada berbagai bidang.

5. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam pembelajaran terkait analisis dinamika hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi. Oleh sebab itu, hal ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya apabila akan meneliti dengan tema yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Kartasasmita Koesnadi. 1997. *Administrasi Internasional*. Bandung: Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung.
- Holsti, K J. 1992. *International Politics, A Framework for Analysis*. New Jersey Prentice Hall.
- Massey. 1993. *Theories of International Migration: A Review and Appraisal*.
- Jackson and Sorenson, 2013, *Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan*.
- Apridar. 2009. *Ekonomi Internasional (Sejarah, Teori dan Permasalahan dalam Aplikasinya)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kate O'Neill. 2009. *The Environment and International Relations*.
- Morgenthau, Hans J. 2005. *Politics Among Nations The Struggle For Power and Peace*.
- Jack, C Plano, Roy Olton. 1982. *The International Dictionary*. England.
- Lawrence Neuman. 2003. *Sosial Research*. University of Wisconsin: Boston.
- Husaini Usman. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara Jogyanto Hartono.
- Simmons, Matthew R. 2005. *"Twilight In The Desert: The Coming Oil Saudi Shock and The World Economy"*. New jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Merriam Websters. *Collegiate Dictionary*.2003. United States of America

JURNAL DAN LAPORAN

- Palais des Nations and ILO headquarters. 2016. *105th Session of International Labor Conferences*.
- ILO. 2015. *Global Estimates on Migrant Workers*.
- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. *Data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2016*.
- OPEC. 2015. *OPEC Share of World Crude Oil Reserves 2014*.
- Kementrian Luar Negri. 2017. *Kaleidoskop Perlindungan WNI 2016 Tahun Kedua Kabinet Kerja*.

Human Right Watch. 2008. *All if I Am Not Human. Abuses Against Asian Domestic Workers in Saudia Arabia.*

Riyan Hidayat. 2015. Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam.

The Wall Street Journal. 2016. *Could Saudi Aramco Be Worth 20 Times Exxon?*

Kementrian Luar Negri. Perjanjian Internasional. Diakses melalui: <http://kemlu.go.id>

Hukuman Mati di 2017: Fakta dan Angka”. Amnesty International.

ISEAS Yusof Ishak Institute. 2017. *List of Memorandum of Understanding (MoU) between Indonesia and Saudi Arabia.*

Kemetrian Kesehatan RI. Diakses melalui www.depkes.go.id

The World Factbook-Saudi Arabia. Cia.gov

Energy Information Agency, Country Analysis Briefs. 2007

Citra Nur Hikmah. Saudi Vision: Reformasi Ekonomi. Maret 2019

Wildan Faisol. Arab Saudi dan Krisis Harga Minyak Tahun 2014-2016 (Saudia Arabia and the oil price of 2014-2016).

Hajj and Umrah are money making factory for Saudi Arabia. Al-Balad. 2020

WEBSITE

Badan Pusat Statistik “Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Berkerja, Pengangguran, TPAK diakses:(http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=06¬ab=5)

Migration and Compacton Migration diakses melalui: <https://refugeesmigrants.un.org/migration-compact>

Migrant Care : 256 TKI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri diakses melalui <https://www.liputan6.com/global/read/786508/migrant-care-256-tki-terancam-hukuman-mati-di-luar-negeri>

Saudi Aramco Official. Diakses di <http://www.saudiaramco.com/en/home/about/who-we-are.html>

Migrant and Compact Migration diakses melalui: <https://refugeesmigrants.un.org/migration-compact>

Ministry of Foreign Affairs. Diakses melalui <https://www.kemlu.go.id/en/berita/berita-perwakilan/Pages/Broadening%20Indonesia-Saudi%20bilateral%20relations.aspx>

Perjanjian persahabatan Indonesia dan Arab Saudi diakses melalui <http://www.aksesdeplu.com/merajut%20ukhuwah%20menjerat%20TKI>. Suprayogi, A 2013. "Malaysia dan Arab Saudi". Negara Kasus TKI Tertinggi, diakses melalui <http://news.liputan6.com/read/624151/malaysia-dan-arab-saudi-negarakasus-btki-tertinggi>).

Pemancungan Ruyati, RI protes Arab Saudi. 19 Juni 2011. Diakses melalui https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/06/110619_ruyati_saudi

Kisruh TKI, RI dan Arab saling membutuhkan. 2 Agustus 2011. Diakses melalui https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/08/110802_tkigeneral

Indonesia-Saudi Billateral Relation. Diakses melalui <http://live.saudigazette.com.sa/article/161484/Broadening-Indonesia-Saudi-bilateral-relations>

Kerjasama Indonesia-Arab Saudi Sinyal Positif Dunia Investasi diakses melalui <https://www.liputan6.com/news/read/2873840/kerjasama-indonesia-arab-saudi-sinyal-positif-dunia-investasi>

Mengharap keuntungan ekonomi hubungan Indonesia-Saudi diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39104120>

Peningkatan jamaah haji. Diakses melalui <https://haji.okezone.com/read/2017/08/31/392/1767111/wow-jumlah-jamaah-haji-2017-meningkat-jadi-hampir-2-juta>.

The economics of the hajj. The annual pilgrimage of muslims to Mecca is a massive logistical challenge for Saudi Arabiam, which has been making significant invesment in infrastucture diakses melalui <https://www.accaglobal.com/an/en/member/member/accounting-business/2018/07/insights/economics-hajj.html>

Indonesia sends biggest number of pilgrims in history. Diakses melalui <http://saudigazette.com.sa/article/515844>

Indonesia and Saudi Arabia strengthen digital economic cooperation diakses melalui <https://www.opengovasia.com/indonesia-and-saudi-arabia-strengthen-digital-economic-cooperation/>

- Siaran Pers, Biro Hubungan Masyarakat. Diakses melalui <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2017/03/06/kunjungan-raja-salman-mendag-arab-saudi-fokus-penting-ekspor-nasional-id0-1488769446.pdf>
- Why Has Will Soon be the New Oil For Saudi Arabia. 2018. Diakses melalui <https://timesofindia.indiatimes.com/world/middle-east/why-hajj-will-soon-be-the-new-oil-for-saudi-arabia/articleshow/65469627.cms>
- Saudi Arabia to see over 20 million visitors by 2020 as hajj pilgrimage boosts tourism sector. 2016. Diakses melalui <https://www.globaldata.com/saudi-arabia-see-20-million-visitors-2020-hajj-pilgrimage-boosts-tourism-sector-says-globaldata/>
- The economics of hajj : money and pilgrimage. Diakses melalui <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-20067809>
- Bin Laden Collapses Kill 107 on 9/11 Anniversary. 2015. Diakses melalui <https://www.wnd.com/2015/09/bin-laden-crane-collapses-kills-107-on-911-anniversary/>
- Saudi Suspends Binladin Group for Grand Mosque Crane Crash. Emirates 247. Diakses melalui <https://www.emirates247.com/news/region/saudi-suspends-binladin-group-for-grand-mosque-crane-crash-2015-09-15-1.603725>
- Saudi Binladin Group Sanctioned over Deadly Crane Crash. Arab News. Diakses melalui <https://www.arabnews.com/saudi-arabia/news/806641>
- Mecca Crane Collapse: Zuma Extends His Condolences. 2015. Diakses melalui <https://ewn.co.za/2015/09/12/Mecca-crane-collapse-Zuma-extends-his-condolences>
- 5 Negara dengan kuota haji terbanyak di seluruh dunia. Diakses melalui <https://m.cnnindonesia.com/internasional/20200401173153-120-489281/5-negara-dengan-kuota-haji-terbanyak-di-seluruh-dunia>